



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



2026

LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT BNSP

Semester I

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN AUDITED TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (452533) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Kode dan Nama Eselon 1 : (013) Ditjen Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Kode dan Nama K/L : (026) Kementerian Ketenagakerjaan

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓

11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak

6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		√	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		√	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		√	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		√	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya. apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		√	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya

2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKTI"

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Felisia Jane Aurora, A.P.Kb.N)
NIP. 199806022018122003

Jakarta, 23 Juli 2026
Penelaah,



(Yudi Hermawan, S.Ant. M.Si)
NIP. 197701172003121001

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Ketengakerjaan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Ketengakerjaan.

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya Adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
NIP 19690725199703100

Ka. Set, BNSP	Paraf	Tanggal
Pembuat Konsep Sub Koordinator RPAK		23/7/26
Penanggung Jawab Koordinator		
Pengendali Administrasi		28/7/26

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Ketenagakerjaan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya Adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di samping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
NIP 19690725199703100

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan Laporan	2
I Laporan Realisasi Anggaran	4
II Neraca	5
III Laporan Operasional	6
IV Laporan Perubahan Ekuitas	7
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	33
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
NIP. 196907251997031001

Ka. Set, BNSP	Paraf	Tanggal
Pembuat Konsep Sub Koordinator RPAK		23/7 '26
Penanggung Jawab Koordinator		
Pengendali Administrasi		28/7.26

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
NIP. 196907251997031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester I Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun Anggaran 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2026 adalah senilai Rp99,943,404, yang terdiri atas Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp64,500,000 berasal dari lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Tahun 2006, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp443,404 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp35,000,000 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp10,540,517,989 atau mencapai 41.30 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp25,522,107,000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp35,176,183,917 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp394,700,231; Aset Tetap sebesar Rp34,777,987,186 dan Aset Lainnya sebesar Rp3,496,500. Sedangkan Nilai Kewajiban Jangka Pendek adalah Rp892,287,163 dan Jumlah Ekuitas adalah Rp34,283,896,754. Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas adalah sebesar Rp35,176,183,917.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp15,965,422,677 sehingga terdapat

defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(15,965,422,677). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp99,943,404 dan Rp(15,865,479,273), sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(15,865,479,273).

- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp38,657,145,304 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(15,865,479,273) dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11,492,230,723 sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp34,283,896,754

- CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

U R A I A N	Catatan	TA 2026		% thd Angg	TA 2025 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	99,943,404	-	354,329,629
JUMLAH PENDAPATAN		-	99,943,404	-	354,329,629
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	13,577,767,000	6,451,868,203	47.52	5,194,815,544
Belanja Barang	B.2.2	15,644,747,000	5,140,305,924	32.86	4,175,504,980
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		29,222,514,000	11,592,174,127	39.67	9,370,320,524

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kepala Sekretariat

Moh Amir Syarifuddin, S.T., M.M
19690725 199703 1 001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

U R A I A N	Catatan	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	200,000,000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.14	-	-
Persediaan	C.15	194,700,231	2,273,845,782
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		394,700,231	2,273,845,782
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	19,246,599,400	19,356,564,400
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	36,433,334,980	36,433,334,980
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	692,456,000	692,456,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(21,594,403,194)	(19,960,621,291)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		34,777,987,186	36,521,734,089
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	2,865,378,000	2,865,378,000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	11,655,000	11,655,000
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(2,873,536,500)	(2,872,371,000)
Jumlah Aset Lainnya		3,496,500	4,662,000
JUMLAH ASET		35,176,183,917	38,800,241,871
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	580,842,963	31,652,367
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-

Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	111,444,200	111,444,200
Uang Muka dari KPPN	C.50	200,000,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		892,287,163	143,096,567
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		892,287,163	143,096,567
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	34,283,896,754	38,657,145,304
JUMLAH EKUITAS		34,283,896,754	38,657,145,304
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		35,176,183,917	38,800,241,871

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	191,047,200
Jumlah Pendapatan		-	191,047,200
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	6,941,063,299	5,645,753,739
Beban Persediaan	D.4	3,113,476,851	2,150,896,653
Beban Barang dan Jasa	D.5	3,782,564,829	2,924,175,805
Beban Pemeliharaan	D.6	146,973,908	217,409,236
Beban Perjalanan Dinas	D.7	236,431,387	42,420,724
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	1,744,912,403	1,814,332,245
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		15,965,422,677	12,794,988,401
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(15,965,422,677)	(12,603,941,201)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	64,500,000	52,930,000
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	35,443,404	110,352,429
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		99,943,404	163,282,429
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(15,865,479,273)	(12,440,658,772)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(15,865,479,273)	(12,440,658,772)

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kepala Sekretariat

Moh Amir Syarifuddin, S.T., M.M
19690725 199703 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	38,657,145,304	42,069,893,896
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(15,865,479,273)	(12,440,658,772)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	11,492,230,723	9,015,990,895
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(4,373,248,550)	(3,424,667,877)
EKUITAS AKHIR	E.6	34,283,896,754	38,645,226,019

Jakarta Selatan, 23 Juli 2026
Kepala Sekretariat

Moh Amir Syarifuddin, S.T., M.M
NIP 196907251997031001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (Audited) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
5. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6.2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN);
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Ketenagakerjaan

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mempunyai tugas pokok untuk:

“Melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mempunyai fungsi:

1. penyusun rencana, program dan anggaran pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara;
2. penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu dan kerja sama;
3. pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian sertifikasi kompetensi kerja; dan
5. pengelolaan data, informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi kerja.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan disusun berdasarkan data SAKTI dan Aplikasi MyIntress untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAKTI terdiri dari 9 (sembilan) modul, mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dihasilkan melalui Modul Pelaporan terdiri dari Modul *General Ledger* dan Pelaporan, Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Modul *General Ledger* dan Pelaporan menghasilkan komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap menghasilkan informasi persediaan, aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemnaker. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemnaker adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan – LRA

- Pendapatan - LRA*
1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

3. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada Kementerian Ketenagakerjaan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA);
 - b. Jasa Pelatihan;
 - c. Jasa Penerbitan Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tugas dan Fungsi;
 - e. Denda Administratif.
5. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa penerbitan surat keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp0 (nol rupiah).
6. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke kas negara.
7. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3. Belanja

Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan (Audited) disusun berdasarkan Laporan Keuangan (Unaudited) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK;
5. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.6/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 748/KMK.02/2018 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6.2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.6/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (BMN);
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

28. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Ketenagakerjaan

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mempunyai tugas pokok untuk:

“Melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mempunyai fungsi:

1. penyusun rencana, program dan anggaran pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi, tata laksana, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara;
2. penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi, pengelolaan manajemen mutu dan kerja sama;
3. pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi;
4. pemberian dukungan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian sertifikasi kompetensi kerja; dan
5. pengelolaan data, informasi dan publikasi, serta pengembangan sistem informasi sertifikasi kompetensi kerja.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan disusun berdasarkan data SAKTI dan Aplikasi MyIntress untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun menggunakan aplikasi SAKTI terdiri dari 9 (sembilan) modul, mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dihasilkan melalui Modul Pelaporan terdiri dari Modul *General Ledger* dan Pelaporan, Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap. Modul *General Ledger* dan Pelaporan menghasilkan komponen Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap menghasilkan informasi persediaan, aset tetap dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemnaker. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemnaker adalah sebagai berikut:

A.6.1. Pendapatan – LRA

- Pendapatan - LRA*
1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

3. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional pada Kementerian Ketenagakerjaan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan yaitu:
 - a. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA);
 - b. Jasa Pelatihan;
 - c. Jasa Penerbitan Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - d. Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tugas dan Fungsi;
 - e. Denda Administratif.
5. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari jasa penerbitan surat keterangan layak keselamatan dan kesehatan kerja serta sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja untuk usaha mikro dan kecil ditetapkan sebesar Rp0 (nol rupiah).
6. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan wajib disetor ke kas negara.
7. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.2. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.6.3. Belanja

Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
5. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.4. Beban

Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya beban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.6.5. Aset

Aset

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
2. Aset disajikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.6.5.1. Aset Lancar

Aset Lancar

1. Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Kas terdiri atas:
 - a. Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.

- b. Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
3. Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.
4. Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga satuan kerja.
5. Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - a. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara.
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara.
6. Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:
 - a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa saldo kas yang terdapat pada rekening lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga dan juga pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kas Lainnya di Bendahara pengeluaran dapat juga berupa bunga, jasa giro, pungutan pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
 - b. Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan baik yang telah menjadi hak pemerintah maupun

tidak dapat diakui sebagai pendapatan misalnya berupa saldo kas yang terdapat pada rekening penampungan atau rekening pemerintah lainnya yang dibuka Kementerian Negara/Lembaga.

Perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening lainnya (menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga) diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan.

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dapat juga berupa utang pajak yang belum disetor ke kas negara, dan belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

- c. Kas Lainnya dari Hibah, dapat berupa kas hibah dari pemberi hibah baik yang belum dilakukan pengesahan maupun yang telah disahkan pada tanggal pelaporan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi atas saldo yang terdapat pada rekening penampungan dana hibah dapat diakui sebagai Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan atau Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah. Nilai kas lainnya dari Hibah yang disajikan diperoleh dari saldo rekening penampungan hibah termasuk saldo yang terdapat pada rekening penyaluran hibah.
 - d. Dalam hal Kas dan Setara Kas Lainnya dikelola Kementerian teridentifikasi sebagai dana yang dibatasi penggunaannya, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai Kas atau Setara Kas lainnya melainkan diakui sebagai Aset Lainnya.
7. Kas dan setara kas diakui pada saat:
- a. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
 - b. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
8. Kas disajikan di neraca menggunakan nilai nominal. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.
- Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian.
9. Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
10. Belanja Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.
- Pencatatan Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/ dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja.
11. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan Surat Ketetapan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

12. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
13. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
14. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
15. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.6.5.2. Aset Tetap

Aset Tetap

1. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

5. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
6. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
7. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - c. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
 - d. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.
8. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
9. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan cara mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
10. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat Aset Tetap dapat disajikan pada Tabel 5

Tabel 5 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

A.6.5.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

1. Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
6. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Kriteria kualitas piutang setelah dikurangi nilai agunan atau nilai aset sita diatur sebagaimana pada Tabel 6

Tabel 6. Penggolongan Kualitas Piutang

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10 %
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat	50 %

	tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan		
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	100 %	

A.6.5.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
3. Sesuatu diakui sebagai ATB diakui jika dan hanya jika:
 - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
4. ATB disajikan sebesar nilai neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.
5. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, amortisasi dilakukan terhadap ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
 - a. Perangkat lunak (*software*) komputer;
 - b. Lisensi;
 - c. Waralaba (*franchise*);
 - d. Hak Cipta (*copyright*); dan
 - e. Hak Paten.
7. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - a. ATB yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan

- b. ATB dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan.
8. Amortisasi pertama kali dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, berdasarkan saldo pada tanggal 1 Januari 2016, dengan menggunakan nilai buku Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2015 yang telah dilakukan amortisasi.
9. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebelum tahun 2015 sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat diamortisasikan.
10. Hasil amortisasi pertama kali dibukukan pada tanggal 1 Januari 2016.
11. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2015, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu.
12. Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
13. Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrua dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.
14. Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat ATB disajikan pada Tabel 7

Tabel 7 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kode Barang					Uraian	Tahun
08	01	01	01	001	Software Komputer	04
08	01	01	01	002	Lisensi	10
08	01	01	01	003	Franchise	05
08	01	01	01	004	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70
08	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
08	01	01	01	008	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II	50
08	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
08	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
08	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fenogram	50
08	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
08	01	01	01	013	Paten Biasa	20
08	01	01	01	014	Merek	10
08	01	01	01	015	Desain Industri	10
08	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
08	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
08	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
08	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

15. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.6. Kewajiban

Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasi ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.6.7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam LPE.

A.7. Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Secara garis besar proses bisnis RPATA dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengisian RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian SPP-Penampungan dengan menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan

tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan.

2. Pembayaran Kepada Penyedia

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan SPP/SPM-Pembayaran.

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

- a. Pekerjaan terselesaikan 100%;
- b. Masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir;
- c. Masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 (satu) kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember tahun berjalan namun dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. 31 Desember tahun berjalan belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir.

3. Penihilan RPATA atas Pekerjaan yang Tidak Terelesaikan

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke Rekening Kas Umum Negara, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan SPP, SPM, SP2D Penihilan.

4. Penyelesaian Pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 (dua) kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka menjaga efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi pencapaian target kinerja program kerja sepanjang tahun anggaran berjalan, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah melakukan penyesuaian alokasi pagu maupun pergeseran anggaran melalui mekanisme revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Selama periode tahun berjalan, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah mengadakan revisi DIPA sebanyak 7 kali, dengan rincian kronologis dan jenis perubahan teknis sebagai berikut:

1. Rincian Kronologis Kategori Revisi DIPA

Penyesuaian anggaran yang dilaksanakan terbagi ke dalam beberapa kategori administratif dan teknis, yang meliputi:

- Revisi Blokir Automatic Adjustment (AA) dilakukan sebanyak 1 kali, dalam rangka mematuhi kebijakan pencadangan anggaran pemerintah pusat (baik berupa pembukaan blokir maupun pergeseran tanda blokir).
- Revisi Efisiensi Anggaran dilakukan sebanyak 1 kali, berupa penghematan alokasi belanja yang dialihkan untuk mendukung program prioritas atau dikembalikan ke Kas Negara.
- Revisi Pergeseran Gaji ke Operasional dilakukan sebanyak 1 kali, guna memenuhi kekurangan kebutuhan belanja pegawai operasional/tunjangan yang bersifat mendesak.
- Revisi Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dilakukan sebanyak 4 kali, yang merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pergeseran antar-komponen/sub-komponen dalam satu kegiatan demi kelancaran teknis operasional satuan kerja.

2. Tabel Rekapitulasi Riwayat Perubahan Anggaran Tahun 2026

Secara kuantitatif, pengaruh matriks perubahan per nomor revisi terhadap nilai pagu akhir belanja disajikan pada tabel di bawah ini:

No. Rev	Nomor & Tanggal SP DIPA / Surat Perubahan	Jenis / Substansi	Pagu Sebelum Revisi (Rp)	Dampak Perubahan (Rp)	Pagu Setelah Revisi (Rp)
00	SP DIPA-026.13.1.452533/2026 01 Desember 2025	DIPA Petikan Awal (Pagu Induk)	25.579.303.000	0	25.579.303.000
01	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 24 Desember 2025	Revisi Anggaran Blokir	25.579.303.000	(213.051.000)	25.366.252.000
02	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 29 Januari 2026	Revisi Pemutakhiran POK	25.366.252.000	0	25.366.252.000
03	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 12 Februari 2026	Revisi Pemutakhiran POK	25.366.252.000	1.675.067.000	27.041.319.000
04	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 9 April 2026	Revisi Penambahan Kekurangan Gaji	27.041.319.000	2.200.195.000	29.241.514.000
05	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 26 April 2026	Revisi Efisiensi Anggaran	29.241.514.000	(19.000.000)	29.222.514.000
06	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 07 Mei 2026	Revisi Pemutakhiran POK	29.222.514.000		29.222.514.000
07	SP.DIPA-026.13.1.452533/2026 21 Mei 2026	Revisi Pemutakhiran POK	29.222.514.000		29.222.514.000

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 8

Tabel 8 Perubahan Anggaran Menurut Pendapatan dan Jenis Belanja

Uraian	Tahun Anggaran 2026	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	11,395,856,000	13,577,767,000
Belanja Barang	14,183,447,000	15,644,747,000
Jumlah Belanja	25,579,303,000	29,222,514,000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

B.1.1 PENDAPATAN PNBP LAINNYA

PNBP Lainnya
sebesar
Rp99,943,404

Realisasi Pendapatan Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp99,943,404 atau 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan menurut Akun

Tabel 9 Estimasi dan Realisasi Pendapatan Menurut Akun
per 30 Juni 2026

Kode Akun	Akun	Estimasi	Realisasi	%
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	99,943,404	
Jumlah				

Realisasi Pendapatan Netto per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp254.386.22. atau 71,79% dibandingkan realisasi pendapatan per 30 Juni 2025. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2025 terdapat penerimaan sewa yang dibayar di muka, sedangkan pada tahun berjalan tidak terdapat penerimaan sejenis, sehingga realisasi PNBP lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Rincian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp64,500,000 terdiri dari:

Tabel 9 Rincian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha per 30 Juni 2026

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	64,500,000
JUMLAH		64,500,000

- a. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp64,500,000 berasal dari lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 1037 WQ pada Sekretariat BNSP, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kementerian Ketenagakerjaan, telah dilakukan penjualan melalui lelang dengan Kode Lot Lelang 5FIQW1 sesuai risalah lelang nomor 124/07.03/2026-01 tanggal 5 Mei 2026 dengan NTPN 9A5042G50C8QCO4M tanggal 7 Mei 2026.

- b. Rincian Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp99,943,404 terdiri dari:

Tabel 9 Rincian Pendapatan Lain-Lain
per 30 Juni 2026

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi (Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	443,404
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35,000,000
JUMLAH		35,443,404

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL berupa Pengembalian Potongan Keterlambatan Tukin Desember 2025 sebesar Rp443,404 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
per 30 Juni 2026

No	Tanggal	No Dokumen	Nilai (Rp)
1	11 Februari 2026	603607QLVBEBGUOU	7,355
2	2 Maret 2026	11CA361QVMC9RI3Q	40,898
3	18 Februari 2026	7734B8N3F60UEIO7	35,158
4	12 Februari 2026	FBF9A3CIG6IELJDR	9,143
5	11 Februari 2026	6CF3D3CIG6IDG1T3	20,114
6	20 Februari 2026	686717QLVBK6GAA	2,233
7	13 Februari 2026	555DF8N3F60Q5GEV	2,937
8	27 Februari 2026	BF9730NA0MRNJ6P8	8,811
9	11 Februari 2026	0411555DFRN6A2ID	13,511
10	25 Februari 2026	5FFCD3CIG6IQJB1H	7,284
11	13 Februari 2026	1B1481JNGHDKM2S9	10,221
12	11 Februari 2026	EE7B22G50C01338G	470
13	20 Februari 2026	24C506U8FGS7PGHF	235
14	12 Februari 2026	9D0FA6U8FGRV43JJ	7,401
15	13 Februari 2026	D87577QLVBEBH4VM	38,064
16	25 Februari 2026	B1A003CIG6IQJAVL	3,642
17	27 Februari 2026	4214261QVMA216VC	353
18	11 Februari 2026	8DCCD55DFRN6A58V	823
19	24 Februari 2026	EC0893CIG6IM5JNH	31,367
20	27 Februari 2026	8D0502G50C0GD73A	8,811
21	20 Februari 2026	DD6A455DFRNEVK1T	7,049
22	12 Februari 2026	045E17QLVBECMJO0	7,049
23	11 Februari 2026	C40EA8N3F60NU5JD	7,402
24	20 Februari 2026	317F26U8FGS7PK6B	21,484
25	11 Februari 2026	5BC80490014PT5TI	25,907
26	20 Februari 2026	4415D8N3F610JKFP	47,496
27	20 Februari 2026	E5E360NA0MRGUMI2	1,791
28	12 Februari 2026	B571C6U8FGRV468T	11,942
29	20 Februari 2026	1A2BA1JNGHDTBMM5	8,410
30	13 Februari 2026	048E53CIG6IFNGLB	1,410
31	20 Februari 2026	67C9F61QVM9RCMT6	9,634
32	13 Februari 2026	8B7D66U8FGS1BGP7	1,293
33	27 Februari 2026	5434D0NA0MRNJ75E	14,685
34	27 Februari 2026	4A1C80NA0MRNJAAM	23,379
35	25 Februari 2026	71C7B1JNGHE1PB31	5,642
Total			443,404

b. **Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu**

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL berupa:

- Pengembalian Kelebihan Pembayaran LSP PEKERJA DOMESTIK LINTAS BENUA sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2021 sebesar Rp15,000,000
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran LSP RAJAWALI HOSPITALITY NUSANTARA sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2021 sebesar Rp20,000,000

Sehingga jumlah pengembalian Belanja Barang TAYL sebesar Rp35,000,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu per 30 Juni 2026

No	Tanggal	No Dokumen	Nilai (Rp)
1	23 April 2026	C77BB8N3F6713FML	15,000,000
2	27 April 2026	B81642G50C6A8FJK	20,000,000
Jumlah			35,000,000

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 12

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Lain-Lain	99,943,404	450,569,629	350,626,225	78
Jumlah	99,943,404	450,569,629	350,626,225	78

Realisasi Pendapatan Netto per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp350,626,225 atau 77.81% dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2025. Penurunan terjadi karena pada tahun sebelumnya terdapat penerimaan sewa yang dibayar di muka, sedangkan pada tahun berjalan tidak terdapat penerimaan sejenis, sehingga realisasi PNBPN lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

B.2. BELANJA

*Realisasi Belanja
Rp11,592,174,127*

Realisasi Belanja netto Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp11,592,174,127 atau 39.69% dari pagu belanja sebesar Rp29,222,514,000.

B.2.1. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

*Realisasi Belanja
Menurut Sumber
Dana
Rp11,592,174,127*

Pada Tahun 2026, Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi mendapatkan alokasi belanja yang sumber dananya diperoleh dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Realisasi Belanja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi per 30 Juni 2026 menurut sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp8,908,337,589 atau 46.39% dari anggaran sebesar Rp17,247,822,000, sumber dana yang berasal dari PNPB terealisasi sebesar Rp1,632,180,400 atau 25.88% dari anggaran sebesar Rp6,306,141,000, sumber dana yang berasal dari PHLN terealisasi sebesar Rp1,051,656,138 atau 28.42% dari anggaran sebesar Rp2,025,340,000.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana disajikan pada Tabel 13

Tabel 13 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
per 30 Juni 2026

Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Rupiah Murni (RM)	19,215,966,000	8,914,636,234	6,298,645	8,908,337,589	46.36
PNBP	6,306,141,000	1,632,180,400	-	1,632,180,400	25.88
Pinjaman Luar Negeri	3,700,407,000	1,051,656,138	-	1,051,656,138	28.42
JUMLAH	25,522,107,000	10,546,816,634	6,298,645	10,540,517,989	41.30

Perbandingan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Netto per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 14

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Netto Menurut Sumber Dana
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Sumber Dana	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Rupiah Murni (RM)	8,908,337,589	9,370,320,524	(461,982,935)	(4.93)
PNBP	1,632,180,400	-	1,632,180,400	-
Pinjaman Luar Negeri	1,051,656,138	-	1,051,656,138	-
JUMLAH	11,592,174,127	9,370,320,524	2,221,853,603	23.71

Dana RM difokuskan untuk membiayai belanja operasional dasar satuan kerja yang meliputi: Belanja Pegawai, Operasional Kantor Harian, dll. Sedangkan Dana PNPB digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan layanan, dll.

B.2.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Rp 25,995,923,368

Realisasi Belanja Kemnaker menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja per 30 Juni 2026 disajikan pada Tabel 15

Tabel 15 Rincian Realisasi Belanja Menurut Akun
per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Belanja Netto (Rp)	%
Belanja Pegawai	13,577,767,000	6,458,166,848	6,298,645	6,451,868,203	47.52
Belanja Barang	15,644,747,000	2,456,469,386	-	2,456,469,386	15.70
JUMLAH	29,222,514,000	8,914,636,234	6,298,645	8,908,337,589	30.48

**Tabel 16 Rincian Perbandingan Belanja Menurut Akun
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	2026			2025			Kenaikan / (Penurunan)	%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Real Angg.		
Belanja Pegawai	13,577,767,000	6,451,868,203	48	9,132,072,000	5,194,815,544	57	1,257,052,659	24.20
Belanja Barang	15,644,747,000	5,140,305,924	33	38,722,591,000	4,175,504,980	11	964,800,944	23.11
Jumlah	29,222,514,000	11,592,174,127	40	47,854,663,000	9,370,320,524	20	2,221,853,603	47.30

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kenaikan Realisasi Belanja di Tahun 2026 dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2025 sebesar 20%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh:

1. pengangkatan 10 (sepuluh) CPNS menjadi PNS yang berdampak pada peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
2. pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang didanai melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN), sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya belum terdapat realisasi belanja atas kegiatan dimaksud.

B.2.2.1. Realisasi Belanja Pegawai

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp6,451,868,203*

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp6,451,868,203 dan Rp5,194,815,544.

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 sebesar Rp6,451,868,203 atau 48% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp13,577,767,000.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 disajikan pada Tabel 17

**Tabel 17 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
per 30 Juni 2026**

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembangan (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3,650,678,000	1,621,486,380	4,301,200	1,621,486,380	44.42
Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,000	27,446	196	27,446	38.12
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155,660,000	88,023,898	430,120	88,023,898	56.55
Belanja Tunj. Anak PNS	54,184,000	30,854,434	172,408	30,854,434	56.94
Belanja Tunj. Struktural PNS	64,020,000	36,080,000	-	36,080,000	56.36
Belanja Tunj. Fungsional PNS	234,464,000	122,776,000	920,000	122,776,000	52.36
Belanja Tunj. PPh PNS	30,227,000	22,889,926	-	22,889,926	75.73
Belanja Tunj. Beras PNS	139,505,000	78,213,600	289,680	78,213,600	56.07
Belanja Uang Makan PNS	400,000,000	168,003,000	-	168,003,000	42.00
Belanja Tunjangan Umum PNS	103,200,000	59,905,000	185,041	59,905,000	58.05
Belanja Gaji Pokok PPPK	500,880,000	286,937,750	-	286,937,750	57.29
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	5,544	-	5,544	92.40
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	24,000,000	12,355,414	-	12,355,414	51.48
Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,800,000	3,692,762	-	3,692,762	54.31
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	22,400,000	12,800,000	-	12,800,000	57.14
Belanja Tunjangan Beras PPPK	26,346,000	14,665,050	-	14,665,050	55.66
Belanja Uang Makan PPPK	95,000,000	36,181,000	-	36,181,000	38.09
Belanja Tunjangan Umum PPPK	22,276,000	12,787,500	-	12,787,500	57.40
Belanja Uang Honor Tetap	2,895,931,000	1,296,718,026	-	1,296,718,026	44.78
Belanja Uang Lembur	18,281,000	568,000	-	568,000	3.11
Belanja Uang Lembur PPPK	7,065,000	288,000	-	288,000	4.08
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,448,976,000	2,230,826,870	-	2,230,826,870	50.14
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	677,796,000	322,081,248	-	322,081,248	47.52
Total	13,577,767,000	6,458,166,848	6,298,645	6,451,868,203	47.52

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel 18

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Jenis Belanja	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Ketidaksihan/Penurunan (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,521,496,390	1,390,142,320	231,354,070	14.2
Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,440	21,700	5,738	20.9
Belanja Tunj. Suami Istri PNS	55,023,898	55,543,542	216,039	2.3
Belanja Tunj. Anak PNS	30,354,434	28,272,556	2,561,878	8.3
Belanja Tunj. Struktural PNS	36,080,000	19,600,000	162,500,000	45.0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	122,775,000	105,312,000	17,463,000	14.2
Belanja Tunj. PPh PNS	22,866,926	18,388,685	4,478,241	19.5
Belanja Tunj. Bersa PNS	76,713,600	71,044,000	7,669,600	9.1
Belanja Uang Makan PNS	168,000,000	117,767,000	50,233,000	29.9
Belanja Tunjangan Umum PNS	59,305,000	49,780,000	9,525,000	16.0
Belanja Gaji Pokok PPPK	266,527,750	131,093,200	155,434,550	58.3
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,544	1,238	4,306	77.6
Belanja Tunjangan Suami Istri PPPK	12,355,414	2,857,800	9,497,614	75.8
Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,850,762	1,143,120	2,707,642	69.0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,800,000	12,800,000	0	-
Belanja Tunjangan Bersa PPPK	14,568,050	5,214,240	9,353,810	64.4
Belanja Uang Makan PPPK	36,181,000	12,403,000	23,778,000	65.7
Belanja Tunjangan Umum PPPK	12,787,500	3,300,000	9,487,500	74.1
Belanja Uang Honor Tetap	1,296,718,028	1,296,718,028	0	-
Belanja Uang Lembur	558,000	0	558,000	100.0
Belanja Uang Lembur PPPK	288,000	0	288,000	100.0
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,230,826,870	1,722,548,396	508,278,474	22.7
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	322,081,248	120,243,703	201,837,545	62.6
Jumlah	6,450,166,848	5,194,615,544	1,255,551,304	2

B.2.2.2. Realisasi Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
Rp5,140,305,924
4

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 5,140,305,924 dan Rp 4,175,504,980

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 sebesar Rp 5,140,305,924 atau 32.85% dari pagu belanja yang ditetapkan sebesar Rp0.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni/30 September/31 Desember 2021 disajikan pada Tabel 19

Tabel 19 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Barang

Per 30 Juni 2026

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	466,071,000	216,068,508	-	216,068,508	46
Belanja Barang Non Operasional	1,327,039,000	255,282,041	-	255,282,041	19
Belanja Barang Persediaan	2,021,608,000	1,034,331,300	-	1,034,331,300	51
Belanja Barang Jasa	9,377,967,000	3,251,218,780	-	3,251,218,780	35
Belanja Barang Pemeliharaan	366,918,000	146,973,908	-	146,973,908	40
Belanja Barang Perjalanan Dalam Negeri	2,085,144,000	236,431,387	-	236,431,387	11
Jumlah	15,644,747,000	5,140,305,924	-	5,140,305,924	33

Realisasi belanja barang tahun 2026 antara lain digunakan untuk: (Isikan sesuai dengan kondisi Satker masing-masing)

1. Perawatan Gedung dan Kantor
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3. Keperluan Perkantoran
4. Langganan Listrik dan Daya
5. Honor Output Kegiatan
6. Persediaan Barang Konsumsi (Blangko Sertifikat)
7. Perjalanan Dinas
8. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Netto per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan pada Tabel 20

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Belanja Barang

Per 30 Juni 2026

Jenis Belanja	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Barang Operasional	216,068,508	494,394,263	(278,325,755)	(56.30)
Belanja Barang Non Operasional	255,282,041	34,282,594	220,999,447	644.64
Belanja Barang Persediaan	1,034,331,300	1,235,681,304	(201,350,004)	(16.29)
Belanja Barang Jasa	3,251,218,780	2,151,537,306	1,099,681,474	51.11
Belanja Barang Pemeliharaan	146,973,908	217,188,789	(70,214,881)	(32.33)
Belanja Barang Perjalanan Dalam Negeri	236,431,387	42,420,724	194,010,663	457.35
JUMLAH	5,140,305,924	4,175,504,980	964,800,944	23.11

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 naik sebesar 23.11% dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025 diantaranya disebabkan adanya pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang didanai melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN), sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya belum terdapat realisasi belanja atas kegiatan dimaksud.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp394.700.231

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp394.700.231 dan Rp2.273.845.782.

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Aset Lancar
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
200,000,000	-	200,000,000	-
194,700,231	2,273,845,782	(2,079,145,551)	(91.44)
394,700,231	2,273,845,782	(1,879,145,551)	(82.54)

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp200.000.000

C.1.1 Kas di bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp200.000.000 dan Rp0

Rincian posisi Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel 22 Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran UP	200,000,000	-	200,000,000	-
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-	-	-
	200,000,000	-	200,000,000	-

Tabel 23 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2026 dan per 30 Juni 2025

Keterangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025 (Rp)
Uang Tunai	148,680,792.00	-
Bank BRI No. Rek 653504525331000	51,319,208.00	-
Jumlah	200,000,000.00	-

C.1.9 Persediaan

Persediaan
Rp194,700,231

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*Supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai persediaan per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 adalah masing- masing sebesar Rp194.700.231 dan Rp2.273.845.782

Tabel 24 Rincian Persediaan Menurut Jenis Persediaan

Kode Akun	Nama Akun	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
117111	Barang Konsumsi	194,700,231	2,273,845,782	2,079,145,551	91.44
	Jumlah	194,700,231	2,273,845,782	2,079,145,551	91.44

per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada pada kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Stock Opname Nomor 27/1335/UM0300/VI/2026 Tanggal 30 Juni 2026 yang terdiri dari:

1. Barang Konsumsi

Barang Konsumsi per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 adalah masing- masing sebesar Rp 194,700,231 dan Rp2.273.845.782 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 25 Rincian Barang Konsumsi

per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Alat Tulis Kantor	30,295,358	2,096,258,624	2,065,963,266	98.55
Kertas dan Cover	11,704,950	11,159,940	(545,010)	(4.88)
Bahan Cetak	149,172,000	153,048,000	3,876,000	2.53
Tinta Cetak	-	9,312,900		
Alat listrik	3,527,923	4,066,318	5,784,977	62.12
Jumlah	194,700,231	2,273,845,782	2,075,079,233	91.26

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap

Rp34,777,987,186

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp34,777,987,186 dan Rp36,521,734,089

Rincian Aset Tetap Menurut Akun per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel 26

Tabel 26 Aset Tetap
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	19,246,599,400	19,356,564,400	(109,965,000)	(1)
Gedung dan Bangunan	36,433,334,980	36,433,334,980	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	692,456,000	692,456,000	-	-
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	56,372,390,380	56,482,355,380	(109,965,000)	(0)
Akumulasi Penyusutan	(21,594,403,194)	(19,960,621,291)	(1,633,781,903)	8
Nilai Buku Aset Tetap	34,777,987,186	36,521,734,089	(1,743,746,903)	(5)

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp19,246,599,400

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 adalah Rp19,246,599,400 dan per 31 Desember 2025 adalah Rp19,356,564,400

Rincian Nilai Peralatan dan Mesin sebagai berikut

Tabel 27 Rincian Peralatan dan Mesin
per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 20XX (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	19,246,599,400	19,356,564,400	109,965,000	1
Jumlah	19,246,599,400	19,356,564,400	109,965,000	1

Mutasi aset tetap – Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 28 Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 20XX		Rp	-
Mutasi Tambah			
Saldo Awal	Rp	19,356,564,400	
Mutasi Kurang (diisi dengan tanda (-))			
Pencatatan barang yang mau di hapuskan	Rp	(109,965,000)	
Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2026	Rp	19,246,599,400	
Akumulasi Penyusutan	Rp	-	
Nilai Buku Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026	Rp	19,246,599,400	

Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp-109965000 atas barang 1 unit Mobil Toyota Avanza sesuai Surat Keterangan KPB Nomor 124/07.03/2026-01 tanggal 5 Mei 2026

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp36,433,334,980

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan per 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 36,433,334,980 dan Rp 36,433,334,980.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp692,456,000

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 692,456,000 dan Rp 692,456,000.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp-
21,594,403,194

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp- 21,594,403,194 dan Rp- 14,850,322,960.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 30 Juni/30 September/31 Desember 20X1

Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Peralatan dan Mesin	19,246,599,400	(15,303,121,430)	3,943,477,970
Gedung dan Bangunan	36,433,334,980	(6,187,413,364)	30,245,921,616
Jaringan	692,456,000	(103,868,400)	588,587,600
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	56,372,390,380	(21,594,403,194)	34,777,987,186

C.4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp3,496,500

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 3,496,500 dan Rp 4,662,000

Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 30 Aset Lainnya
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 20XX (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Tak Berwujud	2,865,378,000	2,865,378,000	-	-
Aset Lain-lain	11,655,000	11,655,000	-	-
Jumlah	2,877,033,000	2,877,033,000	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2,873,536,500)	(2,872,371,000)	(1,165,500)	0.04
Nilai Buku Aset Lainnya	3,496,500	4,662,000	(1,165,500)	(25.00)

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp2,865,378,000

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, namun secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Nilai ATB per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp2,865,378,000 dan Rp2,865,378,000.

Aset Tak Berwujud (ATB) menurut Akun sebagai berikut:

Tabel 31 Aset Tak Berwujud Menurut Akun

Akun	Uraian Akun	Nilai (Rp)
162151	Software	2,865,378,000
Aset Tak Berwujud		2,865,378,000

C.4.4 Aset Lain - Lain

Aset Lain-Lain
Rp11,655,000

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp11,655,000 dan Rp11,655,000.

Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas karena secara fisik sudah rusak berat, tidak efisien untuk diperbaiki, atau tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.4.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp- 2,873,536,500 dan Rp- 2,872,371,000.

Akumulasi penyusutan Aset lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya

per 30 Juni/30 September/31 Desember 20X1

Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Aset Tak Berwujud	2,865,378,000	(2,865,378,000)	
Software	2,865,378,000	(2,865,378,000)	
Aset Lain-Lain	11,655,000	(8,158,500)	3,496,500
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	11,655,000	(8,158,500)	3,496,500
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	2,877,033,000	(2,873,536,500)	3,496,500

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek
Rp892,287,163

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing masing sebesar Rp 892,287,163 dan Rp 143,096,567.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 33 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Utang kepada Pihak Ketiga	580,842,963	31,652,367	549,190,596	1,735
Pendapatan Diterima Dimuka	111,444,200	111,444,200	-	-
Uang Muka dari KPPN	200,000,000	-	200,000,000	-
Jumlah	892,287,163	143,096,567	749,190,596	524

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Pada Pihak
Ketiga
Rp580,842,963*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp580,842,963 dan Rp31,652,367.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga menurut akun disajikan sebagai berikut.

Tabel 34 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Menurut Akun
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Akun	Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	520,847,463	31,652,367	489,195,096	1,545.52
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	59,995,500	-	59,995,500	#DIV/0!
	Jumlah	580,842,963	31,652,367	549,190,596	1,735.07

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp520,847,463 merupakan Gaji Induk PNS bulan Juli tahun 2026 berdasarkan SPM Nomor 114A tanggal 9 Juni 2026, Gaji Induk PPPK bulan Juli tahun 2026 berdasarkan SPM Nomor 115A tanggal 9 Juni 2026, Honor Anggota BNSP Bulan Juni Tahun 2026 untuk 7 Pegawai berdasarkan SPM Nomor 125A tanggal 22 Juni 2026.

2. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp59,995,500 berupa pengadaan jasa internet service provider sesuai kontrak nomor: SP.01/EP/SET-BNSP/I/2026 tanggal 7 Januari 2026, BAPP Termin III Nomor: BAPP.01.03/EP/SET-BNSP/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 dan BAP nomor: BAP.01.03/EP/SET-BNSP/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026.

C.5.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp111,444,200

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp111,444,200 dan Rp111,444,200.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan keadaan pihak ketiga dalam rangka PNPB.

Pendapatan Diterima Dimuka berasal dari:

1. perpanjangan sewa sebagian ruangan/bangunan di Gedung Sekretariat BNSP untuk Kantor Kas Bank BRI periode 1 Maret 2026 s.d 28 Februari 2027 sebesar Rp95.523.600 per tahun, yang dibayar pada 27 Maret 2025 dengan NTPN: D835E2G502PD46U7
2. Saldo Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp15.920.600 yang berasal dari jurnal penyesuaian atas perpanjangan sewa sebagian ruangan/bangunan di Gedung Sekretariat BNSP untuk Kantor Kas Bank BRI periode 1 Maret 2025 s.d. 28 Februari 2026 dengan NTPN B853E7QLV27NI5RG.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, penyesuaian atas pendapatan diterima di muka untuk periode Januari sampai dengan Juni 2026 belum dilakukan sehingga Pendapatan LO dari pemanfaatan BMN berupa sewa ruangan Gedung Sekretariat BNSP belum mencerminkan seluruh pendapatan yang menjadi hak pemerintah sampai dengan tanggal pelaporan. Penyesuaian atas transaksi dimaksud akan dilakukan pada periode pelaporan berikutnya sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

C.5.3. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp200,000,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing – masing sebesar Rp200,000,000 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo tersebut merupakan akun penyeimbang Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Uang Muka dari KPPN

per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
Kas Di Bendahara Pengeluaran UP	200,000,000	-	200,000,000	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran TUP	-	-	-	-
Jumlah	200,000,000	-	200,000,000	-

C.6. EKUITAS

Ekuitas
Rp34,283,896,754

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp34,283,896,754 dan Rp38,657,145,304. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

*Surplus/ (Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
Rp -15,965,422,677*

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp-15,965,422,677 dan Rp-12,603,941,201.

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 30 Juni 2026 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp0 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp15,965,422,677.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 36 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Operasional	-	191,047,200	(191,047,200)	(100.00)
Beban Operasional	15,965,422,677	12,794,988,401	3,170,434,276	24.78
Jumlah Surplus(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(15,965,422,677)	(12,603,941,201)	(3,361,481,476)	26.67

D.1.1. Pendapatan Kegiatan Operasional

*Pendapatan
Kegiatan
Operasional Rp0*

Jumlah Pendapatan Kegiatan Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp191,047,200

Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

*Pendapatan PNB
Lainnya
Rp191,047,200*

Pendapatan Operasional pada Kemnaker per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp191,047,200 merupakan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan PNB Lainya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp191,047,200

Rincian Pendapatan PNB Lainya disajikan sebagai berikut:

**Tabel 37 Rincian Pendapatan PNB Lainya
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
425131	-	191,047,200	(191,047,200)	(100.00)
Total	-	191,047,200	(191,047,200)	(100.00)

Realisasi LO per 30 Juni 2026 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini: (berbeda)

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional
per 30 Juni 2026 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	-	99,943,404	(99,943,404)
TOTAL	-	99,943,404	(99,943,404)

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp99,943,404 terdapat pada:

1. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp64,500,000 berasal dari lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Avanza Tahun 2006 dengan Nomor Polisi B 1037 WQ pada Sekretariat BNSP, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas), Kementerian Ketenagakerjaan, telah dilakukan penjualan melalui lelang dengan Kode Lot Lelang 5FIQW1 sesuai risalah lelang nomor 124/07.03/2026-01 tanggal 5 Mei 2026 dengan NTPN 9A5042G50C8QCO4M tanggal 7 Mei 2026.
2. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Pegawai TAYL berupa Pengembalian Potongan Keterlambatan Tukin Desember 2025 sebesar Rp443,404.
3. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang TAYL berupa:
 - a. Pengembalian Kelebihan Pembayaran LSP PEKERJA DOMESTIK LINTAS BENUA sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2021 sebesar Rp15,000,000;
 - b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran LSP RAJAWALI HOSPITALITY NUSANTARA sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemnaker Tahun 2021 sebesar Rp20,000,000. Sehingga jumlah pengembalian Belanja Barang TAYL sebesar Rp35,000,000.

D.1.2. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional Rp-15,965,422,677

Jumlah Beban Kegiatan Operasional untuk periode per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp-15,965,422,677 dan Rp-12,603,941,201. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan operasional.

Tabel 39 Rincian Beban Operasional

Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian Beban	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pegawai	6,941,063,299	5,645,753,739	1,295,309,560	22.94
Beban Persediaan	3,113,476,851	2,150,896,653	962,580,198	44.75
Beban Barang dan Jasa	3,782,564,829	2,924,175,805	858,389,024	29.35
Beban Pemeliharaan	146,973,908	217,409,235	(70,435,327)	(32.40)
Beban Perjalanan Dinas	236,431,387	42,420,724	194,010,663	457.35
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,744,912,403	1,814,332,245	(69,419,842)	-
Jumlah Beban Kegiatan Operasional	15,965,422,677	12,794,988,401	3,170,434,276	24.78

D.1.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp6,941,063,299

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp6,941,063,299 dan Rp5,645,753,739.

Rincian Beban Pegawai Menurut Akun per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pegawai Menurut Akun
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,825,351,980	1,566,954,420	258,397,560	14.16
Beban Pembulatan Gaji PNS	30,194	24,536	5,658	18.74
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,527,528	97,300,892	1,226,636	1.24
Beban Tunj. Anak PNS	34,496,466	32,189,744	2,306,722	6.69
Beban Tunj. Struktural PNS	40,590,000	24,340,000	16,250,000	40.03
Beban Tunj. Fungsional PNS	140,378,000	118,476,000	21,902,000	15.60
Beban Tunj. PPh PNS	23,290,953	18,702,816	4,588,137	19.70
Beban Tunj. Beras PNS	87,555,780	80,168,940	7,386,840	8.44
Beban Uang Makan PNS	168,003,000	117,767,000	50,236,000	29.90
Beban Tunjangan Umum PNS	66,014,959	55,685,000	10,329,959	15.65
Beban Gaji Pokok PPPK	323,651,950	140,704,000	182,947,950	56.53
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,298	1,256	5,042	80.06
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,104,674	2,857,800	11,246,874	79.74
Beban Tunjangan Anak PPPK	4,200,250	1,143,120	3,057,130	72.78
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,400,000	14,400,000	-	0.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	16,620,390	5,431,500	11,188,890	67.32
Beban Uang Makan PPPK	36,181,000	12,403,000	23,778,000	65.72
Beban Tunjangan Umum PPPK	14,437,500	3,300,000	11,137,500	77.14
Beban Uang Honor Tetap	1,511,110,626	1,511,110,626	-	0.00
Beban Uang Lembur	568,000	-	568,000	100.00
Beban Uang Lembur PPPK	288,000	-	288,000	100.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,199,174,503	1,722,549,386	476,625,117	21.67
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PF	322,081,248	120,243,703	201,837,545	62.67
Jumlah	6,941,063,299	5,645,753,739	1,295,309,560	18.66

Realisasi LO per 30 Juni 2026 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan sebagai berikut:

**Tabel 41 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Per 30 Juni 2026 Menurut LO dan LRA**

URAIAN	PERBANDINGAN		SELISIH
	LO	LRA	
Beban Gaji Pokok PNS	1,825,351,980	1,621,486,380	203,865,600
Beban Pembulatan Gaji PNS	30,194	27,446	2,748
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,527,528	88,023,898	10,503,630
Beban Tunj. Anak PNS	34,496,466	30,854,434	3,642,032
Beban Tunj. Struktural PNS	40,590,000	36,080,000	4,510,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	140,378,000	122,776,000	17,602,000
Beban Tunj. PPh PNS	23,290,953	22,889,926	401,027
Beban Tunj. Beras PNS	87,555,780	78,213,600	9,342,180
Beban Uang Makan PNS	168,003,000	168,003,000	-
Beban Tunjangan Umum PNS	66,014,959	59,905,000	6,109,959
Beban Gaji Pokok PPPK	323,651,950	286,937,750	36,714,200
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,298	5,544	(12,349,116)
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,104,674	12,355,414	1,304,674
Beban Tunjangan Anak PPPK	4,200,250	3,692,762	(10,464,800)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,400,000	12,800,000	(21,781,000)
Beban Tunjangan Beras PPPK	16,620,390	14,665,050	3,832,890
Beban Uang Makan PPPK	36,181,000	36,181,000	(1,260,537,026)
Belanja Tunjangan Umum PPPK	14,437,500	12,787,500	13,869,500
Belanja Uang Honor Tetap	1,511,110,626	1,296,718,026	1,510,822,626
Beban Uang Lembur	568,000	568,000	(2,230,258,870)
Beban Uang Lembur PPPK	288,000	288,000	(321,793,248)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	2,199,174,503	2,230,826,870	2,203,475,703
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	322,081,248	322,081,248	322,081,444
Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS		(4,301,200)	430,120
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		(196)	172,408
Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		(430,120)	920,000
Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS		(172,408)	289,680
Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		(920,000)	185,041
Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS		(289,680)	(6,451,868,203)
Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		(185,041)	-
Jumlah	6,941,063,299	6,451,868,203	489,195,096

Selisih Beban Pegawai menurut LO dan LRA sebesar Rp489,195,096 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Gaji Induk PNS bulan Juli tahun 2026 sesuai SPM Nomor 114A tanggal 9 Juni 2026 Rp262,277,821;
2. Belanja Gaji Induk PPPK bulan Juli tahun 2026 sesuai SPM Nomor 115A tanggal 9 Juni 2026 Rp44,177,042;
3. Honor Anggota BNSP bulan Juni tahun 2026 sesuai SPM Nomor 125A tanggal 22 Juni 2026 Rp214,392,600;
4. Pengembalian Gaji Induk bulan Januari tahun 2026 a.n. Desy Darmayani sebesar Rp6,298,645 sesuai SPM Nomor 1A tanggal 1 Januari 2026;
5. Pembayaran kekurangan Tunjangan Kinerja CPNS periode Mei sampai dengan Desember 2025 yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026;

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 42 Uraian Selisih Beban Gaji Pokok PNS
Per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	208,166,800
Beban Pembulatan Gaji PNS	2,944
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	10,933,750
Beban Tunj. Anak PNS	3,814,440
Beban Tunj. Struktural PNS	4,510,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	18,522,000
Beban Tunj. PPh PNS	401,027
Beban Tunj. Beras PNS	9,631,860
Beban Tunjangan Umum PNS	6,295,000
Beban Gaji Pokok PPPK	36,714,200
Beban Pembulatan Gaji PPPK	754
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,749,260
Beban Tunjangan Anak PPPK	507,488
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,600,000
Beban Tunjangan Beras PPPK	1,955,340
Beban Tunjangan Umum PPPK	1,650,000
Beban Uang Honor Tetap	214,392,600
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	-31,652,367

D.1.2.2. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp3,113,476,851*

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Jumlah beban persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3,113,476,851 dan Rp2,150,896,653.

Rincian Beban Persediaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 43 Beban Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Persediaan Konsumsi	3,113,476,851	2,150,896,653	962,580,198	44.75
Jumlah Beban Persediaan	3,113,476,851	2,150,896,653	962,580,198	44.75

Realisasi LO per (Tahun) dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 44 Perbandingan Realisasi Beban Persediaan
per 30 Juni 2026 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan Konsumsi	3,113,476,851	1,034,331,300	2,079,145,551
TOTAL	3,113,476,851	1,034,331,300	2,079,145,551

Selisih Beban Persediaan menurut LO dan LRA sebesar Rp1,034,331,300. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 45 Uraian Selisih Beban Persediaan
Per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Persediaan Konsumsi	1,034,331,300
Total	1,034,331,300

Terdapat perbedaan antara Belanja Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Beban Persediaan pada Laporan Operasional (LO). Perbedaan tersebut disebabkan oleh pengakuan belanja pada LRA yang dilakukan pada saat pengeluaran kas, sedangkan pengakuan beban pada LO dilakukan pada saat persediaan digunakan. Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Nomor 27/1335/UM0300/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, pemakaian barang persediaan konsumsi (habis pakai) sampai dengan Semester I Tahun 2026 sebesar Rp194.700.231, sedangkan persediaan yang belum digunakan masih disajikan sebagai Persediaan pada Neraca. Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp3,782.564,829

Beban barang dan jasa adalah konsumsi atas barang/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan/entitas.

Beban barang dan jasa per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3,782,564,829 dan Rp2,924,175,805

Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 46 Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	84,688,158	486,631,733	(401,943,575)	(82.60)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,060,350	35,327,530	64,732,820	183.24
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	31,320,000	-	31,320,000	-
Beban Bahan	185,532,041	34,282,594	151,249,447	441.18
Beban Honor Output Kegiatan	69,750,000	-	69,750,000	-
Beban Langganan Listrik	273,615,505	329,058,592	(55,443,087)	(16.85)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	179,986,500	134,493,750	45,492,750	33.83
Beban Sewa	187,320,000	198,970,000	(11,650,000)	(5.86)
Beban Jasa Profesi	19,800,000	30,000,000	(10,200,000)	(34.00)
Beban Jasa Lainnya	2,650,492,275	1,675,411,606	975,080,669	58.20
Jumlah Beban Barang dan Jasa	3,782,564,829	2,924,175,805	858,389,024	29.35

Realisasi LO per 30 Juni 2026 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 47 Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 30 Juni 2026 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Keperluan Perkantoran	84,688,158	84,688,158	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,060,350	100,060,350	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	31,320,000	31,320,000	-
Beban Bahan	185,532,041	185,532,041	-
Beban Honor Output Kegiatan	69,750,000	69,750,000	-
Beban Langganan Listrik	273,615,505	273,615,505	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	179,986,500	119,991,000	59,995,500
Beban Sewa	187,320,000	187,320,000	-
Beban Jasa Profesi	19,800,000	19,800,000	-
Beban Jasa Lainnya	2,650,492,275	2,650,492,275	-
TOTAL	3,782,564,829	3,722,569,329	59,995,500

Selisih Beban Barang dan Jasa menurut LO dan LRA dapat dijelaskan sebagai berikut: (Isi jika ada selisih pada LO dan LRA)

1. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp59,995,500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 48 Uraian Selisih Beban Keperluan Perkantoran
Per 30 Juni 2026

Uraian	Nilai (Rp)
Pembayaran listrik sesuai SPM No 133A tanggal 30 Juni 2026, SP2D No.261820000065290 tanggal 2 Juli 2026	59,995,500
Total	59,995,500

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp146,973,908

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban pemeliharaan per **30 Juni 2026** dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp146,973,908 dan Rp217,409,235

Tabel 49 Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni/30 September/31	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,905,400	120,070,920	(92,165,520)	(76.78)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,068,508	97,117,869	(21,950,639)	(22.60)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	220,446	220,446	
Jumlah Beban Pemeliharaan	146,973,908	217,409,235	- 114,116,159	(52.49)

Realisasi LO 30 Juni 2026 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 50 Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,905,400	27,905,400	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,068,508	119,068,508	-
TOTAL	27,905,400	27,905,400	-

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp236,431,387

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 236,431,387 dan Rp42,420,724.

Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 51 Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	236,431,387	42,420,724	194,010,663	457.35
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	236,431,387	42,420,724	194,010,663	457.35

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar Rp194,010,663 atau 457.35% yang disebabkan adanya pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang didanai melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN), sementara pada periode yang sama tahun sebelumnya belum terdapat realisasi belanja atas kegiatan dimaksud.

Realisasi LO per 30 Juni 2026 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 52 Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Perjalanan Dinas Biasa	236,431,387	236,431,387	-
TOTAL	236,431,387	236,431,387	-

D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1,774,912,403

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan Aset Tak Berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1,744,912,403 dan Rp1,814,332,245.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 53 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Akun	30 Juni/30 September/31	30 Juni/30 September/31	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,247,972,198	1,291,179,442	(43,207,244)	(3.35)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	487,119,006	513,089,606	(25,970,600)	(5.06)
Beban Penyusutan Jaringan	8,655,699	8,655,699	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasional pemerintahan	1,165,500	1,407,498	(241,998)	(17.19)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,744,912,403	1,814,332,245	(69,419,842)	(3.83)

D.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp99,943,404

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp99,943,404 dan Rp163,282,429. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tersebut merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp64,500,000 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp35,443,404.

Pos Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada (Tahun) dan (Tahun) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 54 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.86
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	354,434,040	110,352,429	244,081,611	221.18
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	418,934,040	163,282,429	255,651,611	156.57

D.2.1 Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari
Pelepasan Aset Non
Lancar

Rp64,500,000

Surplus/Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban kerugian pelepasan aset non lancar.

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp64,500,000 dan Rp52,930,000. Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp64,500,000 dikurangi Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0.

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 55 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Pelepasan Aset Non Lancar
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaiikan / (Penurunan)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.86
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.86

D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan
Pelepasan Non
Lancar

Rp64,500,000

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp Rp64,500,000 dan Rp52,930,000.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 56 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaiikan / (Penurunan)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.86
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.86

D.2.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional

Lainnya

Rp35,443,404

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35,443,404 dan Rp 110,352,429.

Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp35,443,404 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0

Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	443,404	-	443,404	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35,000,000	110,352,429	(75,352,429)	(68.28)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(34,556,596)	(110,352,429)	75,795,833	(68.69)

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp35,443,404

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35,443,404 dan Rp 110,352,429.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 58 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	443,404	-	443,404	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	35,000,000	110,352,429	(75,352,429)	(68.28)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,443,404	110,352,429	(74,909,025)	(67.88)

D.3.SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit
Laporan
Operasional Rp-
15,865,479,273

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp- 15,865,479,273 dan Rp- 12,440,658,772.

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per (Tahun) adalah Defisit sebesar Rp 15,865,479,273. Nilai tersebut diperoleh dari Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp- 15,965,422,677 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 99,943,404.

Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional disajikan pada Tabel 59

Tabel 59 Rincian Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Akun	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Surplus/(Defisit) - Kegiatan Operasional	(15,965,422,677)	(12,603,941,201)	(3,361,481,476)	26.67
Surplus/(Defisit) - Kegiatan Non Operasional	99,943,404	163,282,429	(63,339,025)	(38.79)
Surplus/(Defisit) - LO	(15,865,479,273)	(12,440,658,772)	(3,424,820,501)	27.53

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp38,657,145,304

Nilai Ekuitas Awal per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp38.657.145.304 dan Rp42.069.893.896. Nilai Ekuitas Awal Tahun 2026 merupakan nilai Ekuitas Akhir pada Neraca Tahun 2025 *Audited*.

E.2. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional

Surplus (Defisit) LO
Rp(15,865,479,273)

Nilai Surplus/Defisit Laporan Operasional per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Defisit sebesar Rp-15.865.479.273 dan Rp-12.440.658.772.

Surplus/(Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp11,492,230,723

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi antar entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lain (Diterima Dari Entitas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain, Transfer Masuk dan Transfer Keluar, dan Pengesahan Hibah Langsung) serta antar unit dalam Entitas Pelaporan itu sendiri (Transfer Masuk dan Transfer Keluar).

Transaksi Antar Entitas Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp11,492,230,723 dan Rp9,015,990,895. Rincian Transaksi Antar Entitas disajikan pada Tabel 60.

Tabel 60 Rincian Transaksi Antar Entitas
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026 (Rp)	30 Juni 2025 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	11,592,174,127	9,370,320,524	2,221,853,603	23.71
Diterima dari Entitas Lain	99,943,404	354,329,629	(254,386,225)	(71.79)
Jumlah	11,492,230,723	9,015,990,895	1,967,467,378	21.82

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari
Entitas
Lain Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp11,492,230,723

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada Kemnaker yang melibatkan kas negara pada Bendahara Umum Negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2026 Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp99,943,404, sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp11,592,174,127.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp34,283,896,754

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp34,283,896,754 dan Rp38,645,226,019.

F. Catatan Penting Lainnya

Penyalahgunaan dana pajak pada Sekretariat BNSP tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.522.828.520,- dan Rp1.865.144.697,- dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020 sebesar Rp. 4.522.828.520

1. Sudah dibayar sebesar Rp. 665.245.750,-
2. Terdapat tambahan setor pajak Tahun 2020 Rp333.850.000,- yang disetorkan pada tahun 2023
3. Terdapat tambahan setor pajak Tahun 2020 Rp963.000 yang disetorkan pada tahun 2025
4. Terdapat tambahan setor pajak Tahun 2020 Rp2.140.000 yang disetorkan pada tahun 2026
4. Total Pajak Tahun 2020 yang sudah dibayar sebesar Rp1.002.198.750,-
5. Sisa Pajak yang belum dibayarkan tahun 2020 sebesar Rp3.520.629.770,-

Tahun 2021 sebesar Rp. 1.865.144.697

1. Sudah dibayarkan sebesar Rp. 1.698.990.000
2. Sisa Pajak yang belum dibayarkan Tahun 2021 sebesar Rp. 166.154.697
3. Terdapat tambahan setor pajak tahun 2021 sebesar Rp155.153.697,- yang setorkan pada tahun 2023
4. Terdapat tambahan setor pajak tahun 2021 sebesar Rp11.216.500,- yang setorkan pada tahun 2023
5. Pajak Tahun 2021 telah LUNAS dibayarkan

Sehingga progres tindak lanjut penyetoran dan sisa pajak Sekretariat BNSP Ditjen Binalavotas adalah sebagai berikut:

1. Total pajak yang sudah dibayarkan untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebesar Rp2.865.203.447 (Rp1.000.058.075 + Rp1.865.144.697)
2. Sisa pajak yang belum dibayarkan untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp3.520.629.770,- yang merupakan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran TA 2020 dan TA 2021



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI DKI JAKARTA
KPPN JAKARTA VII

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 452533 - SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

Tgl Cetak : 21/07/26 5:17

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	29,222,514,000	29,222,514,000	0
2	Belanja	11,598,472,772	11,598,472,772	0
3	Pengembalian Belanja	-6,298,645	-6,298,645	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	99,943,404	99,943,404	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	200,000,000	200,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	200,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14 Juli 2026



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 026
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS 13
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI 452533

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:26 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	99,943,404	99,943,404	0	0	354,329,629	(354,329,629)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	99,943,404	99,943,404	0	0	354,329,629	(354,329,629)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	99,943,404	99,943,404	0	0	354,329,629	(354,329,629)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	29,222,514,000	11,592,174,127	(17,630,339,873)	40	47,854,663,000	9,370,320,524	38,484,342,476	20
1. Belanja Pegawai	13,577,767,000	6,451,868,203	(7,125,898,797)	48	9,132,072,000	5,194,815,544	3,937,256,456	57
2. Belanja Barang	15,644,747,000	5,140,305,924	(10,504,441,076)	33	38,722,591,000	4,175,504,980	34,547,086,020	11
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 026
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS 13
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI 452533

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM
Tgl Cetak : 21/07/26 5:26 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29,222,514,000	11,592,174,127	(17,630,339,873)	40	47,854,663,000	9,370,320,524	38,484,342,476	20
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 21 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
NIP 196907251997031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026
SATUAN KERJA : 452533

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 21/07/26 5:26 PM
Halaman : 1

Prj ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,111,323,000	3,650,678,000	1,621,486,380	4,301,200	1,617,185,180	44.3	2,033,492,820
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,000	72,000	27,446	196	27,250	37.85	44,750
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	137,860,000	155,660,000	88,023,898	430,120	87,593,778	56.27	68,066,222
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	42,449,000	54,184,000	30,854,434	172,408	30,682,026	56.63	23,501,974
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	89,020,000	64,020,000	36,080,000	0	36,080,000	56.36	27,940,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	192,890,000	234,464,000	122,776,000	920,000	121,856,000	51.97	112,608,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	43,734,000	30,227,000	22,889,926	0	22,889,926	75.73	7,337,074
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	126,310,000	139,505,000	78,213,600	289,680	77,923,920	55.86	61,581,080
511129	Belanja Uang Makan PNS	300,000,000	400,000,000	168,003,000	0	168,003,000	42	231,997,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	99,200,000	103,200,000	59,905,000	185,041	59,719,959	57.87	43,480,041
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	369,240,000	500,880,000	286,937,750	0	286,937,750	57.29	213,942,250
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,000	6,000	5,544	0	5,544	92.4	456
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,000,000	24,000,000	12,355,414	0	12,355,414	51.48	11,644,586
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,800,000	6,800,000	3,692,762	0	3,692,762	54.31	3,107,238
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	19,200,000	22,400,000	12,800,000	0	12,800,000	57.14	9,600,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7,819,000	26,346,000	14,665,050	0	14,665,050	55.66	11,680,950
511628	Belanja Uang Makan PPPK	100,000,000	95,000,000	36,181,000	0	36,181,000	38.09	58,819,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,600,000	22,276,000	12,787,500	0	12,787,500	57.4	9,488,500
512111	Belanja Uang Honor Tetap	2,895,931,000	2,895,931,000	1,296,718,026	0	1,296,718,026	44.78	1,599,212,974
512211	Belanja Uang Lembur	36,565,000	18,281,000	568,000	0	568,000	3.11	17,713,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	7,065,000	7,065,000	288,000	0	288,000	4.08	6,777,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	4,112,976,000	4,448,976,000	2,230,826,870	0	2,230,826,870	50.14	2,218,149,130
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	677,796,000	677,796,000	322,081,248	0	322,081,248	47.52	355,714,752
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	11,395,856,000	13,577,767,000	6,458,166,848	6,298,645	6,451,868,203	47.56	7,125,898,797
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	637,275,000	205,611,000	84,688,158	0	84,688,158	41.19	120,922,842
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	80,000,000	0	0	0	0	0	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	93,960,000	93,960,000	31,320,000	0	31,320,000	33.33	62,640,000
521211	Belanja Bahan	4,380,000	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,000,000	63,600,000	57,531,300	0	57,531,300	90.46	6,068,700
522111	Belanja Langganan Listrik	648,000,000	595,200,000	273,615,505	0	273,615,505	45.97	321,584,495
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	384,000,000	360,000,000	119,991,000	0	119,991,000	33.33	240,009,000
522141	Belanja Sewa	218,000,000	198,000,000	187,320,000	0	187,320,000	94.61	10,680,000
522151	Belanja Jasa Profesi	0	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,813,460,000	3,699,360,000	1,541,314,575	0	1,541,314,575	41.66	2,158,045,425
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	382,500,000	119,000,000	27,905,400	0	27,905,400	23.45	91,094,600
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361,671,000	247,918,000	119,068,508	0	119,068,508	48.03	128,849,492
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156,720,000	41,550,000	13,714,940	0	13,714,940	33.01	27,835,060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 026
SATUAN KERJA : 452533

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 21/07/26 5:26 PM
Halaman : 2

Fig ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BARANG	5,851,966,000	5,638,199,000	2,456,469,386	0	2,456,469,386	43.57	3,181,729,614
	JUMLAH RUPIAH MURNI	17,247,822,000	19,215,966,000	8,914,636,234	6,298,645	8,908,337,589	46.39	10,307,628,411
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
52	BELANJA BARANG							
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,025,340,000	3,700,407,000	1,051,656,138	0	1,051,656,138	28.42	2,648,750,862
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,025,340,000	3,700,407,000	1,051,656,138	0	1,051,656,138	28.42	2,648,750,862
	JUMLAH PINJAMAN LUAR NEGERI	2,025,340,000	3,700,407,000	1,051,656,138	0	1,051,656,138	28.42	2,648,750,862
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120,000,000	166,500,000	100,060,350	0	100,060,350	60.1	66,439,650
521211	Belanja Bahan	1,658,083,000	1,149,389,000	185,532,041	0	185,532,041	16.14	963,856,959
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	264,050,000	167,250,000	69,750,000	0	69,750,000	41.7	97,500,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,000,000,000	1,958,008,000	976,800,000	0	976,800,000	49.89	981,208,000
522141	Belanja Sewa	33,200,000	0	0	0	0	0	0
522151	Belanja Jasa Profesi	554,000,000	585,200,000	19,800,000	0	19,800,000	3.38	565,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	262,600,000	236,200,000	57,521,562	0	57,521,562	24.35	178,678,438
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,046,728,000	2,000,694,000	222,716,447	0	222,716,447	11.13	1,777,977,553
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	270,730,000	42,900,000	0	0	0	0	42,900,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	96,750,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	6,306,141,000	6,306,141,000	1,632,180,400	0	1,632,180,400	25.88	4,673,960,600
	JUMLAH PNBP	6,306,141,000	6,306,141,000	1,632,180,400	0	1,632,180,400	25.88	4,673,960,600
	TOTAL	25,579,303,000	29,222,514,000	11,598,472,772	6,298,645	11,592,174,127	39.69	17,630,339,873

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	0	200,000,000	0.00
Persediaan	194,700,231	2,273,845,782	(2,079,145,551)	(91.44)
JUMLAH ASET LANCAR	394,700,231	2,273,845,782	(1,879,145,551)	(82.64)
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	19,246,599,400	19,356,564,400	(109,965,000)	(0.57)
Gedung dan Bangunan	36,433,334,980	36,433,334,980	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	692,456,000	692,456,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(21,594,403,194)	(19,960,621,291)	(1,633,781,903)	8.19
JUMLAH ASET TETAP	34,777,987,186	36,521,734,089	(1,743,746,903)	(4.77)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,865,378,000	2,865,378,000	0	0.00
Aset Lain-lain	11,655,000	11,655,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,873,536,500)	(2,872,371,000)	(1,165,500)	0.04
JUMLAH ASET LAINNYA	3,496,500	4,662,000	(1,165,500)	(25.00)
JUMLAH ASET	35,176,183,917	38,800,241,871	(3,624,057,954)	(9.34)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	580,842,963	31,652,367	549,190,596	1,735.07
Pendapatan Diterima Dimuka	111,444,200	111,444,200	0	0.00
Uang Muka dari KPPN	200,000,000	0	200,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	892,287,163	143,096,567	749,190,596	523.56
JUMLAH KEWAJIBAN	892,287,163	143,096,567	749,190,596	523.56
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	34,283,896,754	38,657,145,304	(4,373,248,550)	(11.31)
JUMLAH EKUITAS	34,283,896,754	38,657,145,304	(4,373,248,550)	(11.31)
JUMLAH EKUITAS	34,283,896,754	38,657,145,304	(4,373,248,550)	(11.31)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	35,176,183,917	38,800,241,871	(3,624,057,954)	(9.34)

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.

NIP 196907251997031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:16 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	200,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	194,700,231	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	19,246,599,400	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	36,433,334,980	0
0.0	134113	Jaringan	692,456,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	15,303,121,430
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,187,413,364
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	103,868,400
0.0	162151	Software	2,865,378,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	11,655,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,158,500
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,865,378,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	520,847,463
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	59,995,500
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	111,444,200
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	200,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,592,174,127
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	99,943,404	0
0.0	391111	Ekuitas	0	38,657,145,304
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	64,500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	443,404
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,825,351,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	30,194	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98,527,528	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	34,496,466	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,590,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	140,378,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	23,290,953	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	87,555,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	168,003,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	66,014,959	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	323,651,950	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,298	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,104,674	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,200,250	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,400,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:16 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	16,620,390	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	36,181,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	14,437,500	0
3.0	512111	Beban Uang Honor Tetap	1,511,110,626	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	568,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	288,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,199,174,503	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	322,081,248	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	84,688,158	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,060,350	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	31,320,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	185,532,041	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	69,750,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	273,615,505	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	179,986,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	187,320,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	19,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,650,492,275	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,905,400	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,068,508	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	236,431,387	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,247,972,198	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	487,119,006	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	8,655,699	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,165,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,113,476,851	0
JUMLAH			75,709,489,692	75,709,489,692

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.

NIP 196907251997031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:16 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	11,592,174,127
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	99,943,404	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	64,500,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	443,404
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,621,486,380	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,446	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	88,023,898	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	30,854,434	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,080,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	122,776,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,889,926	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,213,600	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	168,003,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	59,905,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	286,937,750	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,544	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,355,414	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,692,762	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12,800,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,665,050	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	36,181,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	12,787,500	0
3.0	512111	Belanja Uang Honor Tetap	1,296,718,026	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	568,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	288,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,230,826,870	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	322,081,248	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	84,688,158	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100,060,350	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,320,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	185,532,041	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	69,750,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,034,331,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	273,615,505	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	119,991,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	187,320,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	19,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:16 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,650,492,275	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,905,400	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,068,508	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236,431,387	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	4,301,200
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	196
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	430,120
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	172,408
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	920,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	289,680
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,041
JUMLAH			11,698,416,176	11,698,416,176

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.

196907251997031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ESELON I : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:11 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	191,047,200	(191,047,200)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	191,047,200	(191,047,200)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	191,047,200	(191,047,200)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,941,063,299	5,645,753,739	1,295,309,560	22.943
Beban Persediaan	3,113,476,851	2,150,896,653	962,580,198	44.753
Beban Barang dan Jasa	3,782,564,829	2,924,175,805	858,389,024	29.355
Beban Pemeliharaan	146,973,908	217,409,235	(70,435,327)	(32.398)
Beban Perjalanan Dinas	236,431,387	42,420,724	194,010,663	457.349
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ESELON I : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 3:44 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:11 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,744,912,403	1,814,332,245	(69,419,842)	(3.826)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	15,965,422,677	12,794,988,401	3,170,434,276	24.779
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(15,965,422,677)	(12,603,941,201)	(3,361,481,476)	26.67
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.859
Pendapatan Pelepasan Aset	64,500,000	52,930,000	11,570,000	21.859
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,443,404	110,352,429	(74,909,025)	(67.882)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,443,404	110,352,429	(74,909,025)	(67.882)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	99,943,404	163,282,429	(63,339,025)	(38.791)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15,865,479,273)	(12,440,658,772)	(3,424,820,501)	27.529
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15,865,479,273)	(12,440,658,772)	(3,424,820,501)	27.529

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.

NIP 196907251997031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (026) KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

UNIT ORGANISASI : (13) DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (452533) SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 21/07/26 12:34 PM

Tgl Cetak : 21/07/26 5:12 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	38,657,145,304	42,069,893,896	(3,412,748,592)	(8.11)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15,865,479,273)	(12,440,658,772)	(3,424,820,501)	27.53
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	11,492,230,723	9,015,990,895	2,476,239,828	27.46
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(4,373,248,550)	(3,424,667,877)	(948,580,673)	27.7
EKUITAS AKHIR	34,283,896,754	38,645,226,019	(4,361,329,265)	(11.29)

Keterangan :

FINAL

Jakarta Selatan, 21 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.

NIP 196907251997031001

Pelaksanaan Program Prioritas Nasional

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) Program Prioritas Nasional yang terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan pagu mencapai Rp10,006,548,000,- dan realisasi sebesar Rp2,683,836,538,- dengan rincian sebagai berikut:

Program prioritas/kegiatan prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan output strategis	Target	Capaian output strategis	%
Pembinaan LSP	1,233,600,000	127,222,829	10.313	Lembaga	50	0	36.1
SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih	3,700,407,000	1,051,656,138	28.42	Orang	360	738	100
Tenaga kerja yang mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja	4,374,595,000	1,356,020,871	30.998	Orang	4838	181	55.8
Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja	636,368,000	146,206,700	22.975	NSPK	62	35	61.6
Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja Pekerjaan Hijau (Green jobs)	61,578,000	2,730,000	4.4334	NSPK	6	3	50.4
Total	10,006,548,000	2,683,836,538	16	-	5,316	957	61

Tahun 2026

Dasar Hukum Tata Cara Revisi :

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 107/PMK.02/2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akutansi Dan Pelaporan Keuangan;
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Revisi DIPA I

- Surat Menteri Keuangan Nomor: S-817/MK.03/2025, tanggal 8 Desember 2025, perihal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025.
- Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/237/KU.01/XII/2025, tanggal 16 Desember 2025, perihal Penyampaian Rekapitulasi Hasil Identifikasi Pengutamaan Anggaran Untuk Pemenuhan Program Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026.
- Surat Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Nomor: S-1094/AG/AG.3/2025, tanggal 24 Desember 2025, perihal Pengesahan Revisi Anggaran ke-1 Pada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Dalam Rangka Memenuhi Prioritas Direktif Presiden TA 2026.
- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke 01, tanggal 24 Desember 2025 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 7077-8523-0039-7338.
- Revisi ini dilakukan pencantuman anggaran blokir pada Halaman IV DIPA Sekretariat BNSP sebesar Rp. 528.612.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Revisi DIPA II

- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat BNSP nomor 2.1/200/K.U/I/2026, tanggal 29 Januari 2026 perihal Usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Kanwil Perbendaharaan.
- Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor: S-635/WPB.12/2026, tanggal 29 Januari 2026, perihal Pengesahan Revisi DIPA ke-2 Satker Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (452533) Kementerian Ketenagakerjaan.
- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke 02, tanggal 29 Januari 2026 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 7077-8523-0039-7338.
- Revisi ini dilaksanakan untuk melakukan proses pemutakhiran data atas revisi anggaran pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

Revisi DIPA III

- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat BNSP nomor 2.1/275/KU.01/II/2026, tanggal 11 Februari 2026 perihal Usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Kanwil Perbendaharaan.
- Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor: S-1248/WPB.12/2026, tanggal 12 Februari 2026, perihal Pengesahan Revisi DIPA

ke-3 Satker Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (452533) Kementerian Ketenagakerjaan.

- Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII Nomor: S-56/KPN.1207/2026 tanggal 13 Januari 2026 perihal Konfirmasi Permohonan Pengesahan Daftar Sisa PHLN TA 2025.
- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Revisi ke 03, tanggal 12 Februari 2026 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 4603-7708-2065-5369.
- Revisi ini ditujukan untuk memenuhi belanja *carry over* yang berasal dari sisa PHLN TA 2025 ke tahun 2026

Revisi DIPA IV

- Surat Dirjen Binalavotas Nomor: B-1/293/KU.02/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran.
- Surat Direktur Pelaksana Anggaran Nomor: S-165/PB.2/2026 tanggal 9 April 2026 perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2026 Kementerian Ketenagakerjaan.
- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke 04, tanggal 9 April 2026 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 7525-6280-0049-1446.
- Revisi ini dilaksanakan untuk melakukan penambahan kekurangan belanja pegawai tahun anggaran 2026 di Sekretariat BNSP.

Revisi DIPA V

- Surat Menteri Keuangan Nomor: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga TA 2026.
- Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/61/KU.01/IV/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Kemnaker T.A 2026 yang Diusulkan Dilakukan Pergeseran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelilaan Belanja Lainnya.
- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: B-1/404/KU.01/IV/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Usulan Revisi Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026.
- Surat Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Nomor: S-281/AG/AG.3/2025, tanggal 22 April 2026, perihal Revisi Penajaman Belanja Lingkup Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan TA 2026.
- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Revisi ke 05, tanggal 26 April 2026 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 0749-4384-9525-0994.
- Revisi ini dilaksanakan untuk melakukan revisi penajaman akun yang bersumber dari belanja perjalanan dinas pada Sekretariat BNSP.

Revisi DIPA VI

- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat BNSP nomor 2.1/545/K.U/V/2026, tanggal 6 Mei 2026 perihal Usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Kanwil Perbendaharaan.
- Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor: S-3337/WPB.12/2026, tanggal 7 Mei 2026, perihal Pengesahan Revisi DIPA ke-6

Satker Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (452533) Kementerian Ketenagakerjaan.

- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke 06, tanggal 07 Mei 2026 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 0749-4384-9525-0994.
- Revisi ini dilaksanakan untuk melakukan proses pemutakhiran data atas revisi anggaran pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
-

Revisi DIPA VII

- Surat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat BNSP nomor 2.1/590/K.U/V/2026, tanggal 21 Mei 2026 perihal Usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Kanwil Perbendaharaan.
- Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Nomor: S-3990/WPB.12/2026, tanggal 21 Mei 2026, perihal Pengesahan Revisi RPD Halaman III DIPA ke-7 Satker Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (452533) Kementerian Ketenagakerjaan.
- Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Revisi ke 07, tanggal 21 Mei 2026 Nomor: SP.DIPA-026.13.1.452533/2026, kode DS: 0749-4384-9525-0994.
- Revisi ini dilaksanakan untuk melakukan proses pemutakhiran data rencana penarikan dana triwulan III pada lembar III DIPA

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 026
 UAKPB : 452533

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
 Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,005	19,356,564,400	0	0	1	109,965,000	1,004	19,246,599,400
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,877,661,500	0	0	0	0	2	1,877,661,500
3010305010	Pompa Air	Unit	1	31,635,000	0	0	0	0	1	31,635,000
3020101001	Sedan	Unit	1	270,780,000	0	0	0	0	1	270,780,000
3020101002	Jeep	Unit	8	4,455,051,300	0	0	0	0	8	4,455,051,300
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,114,336,500	0	0	1	109,965,000	4	1,004,371,500
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	39,050,000	0	0	0	0	2	39,050,000
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	2	55,944,000	0	0	0	0	2	55,944,000
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,998,000	0	0	0	0	1	1,998,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	3	118,140,000	0	0	0	0	3	118,140,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	40,800,000	0	0	0	0	6	40,800,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	24	355,416,700	0	0	0	0	24	355,416,700
3050104003	Rak Besi	Buah	1	1,887,000	0	0	0	0	1	1,887,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	4	31,666,813	0	0	0	0	4	31,666,813
3050104007	Brandkas	Buah	1	14,430,000	0	0	0	0	1	14,430,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	41,058,900	0	0	0	0	1	41,058,900
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	129,184,000	0	0	0	0	5	129,184,000
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	122,999,100	0	0	0	0	1	122,999,100
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	10	176,923,200	0	0	0	0	10	176,923,200
3050105082	Mesin Fogging	Buah	1	4,395,600	0	0	0	0	1	4,395,600
3050105095	Wastafel Portable	unit	1	11,185,600	0	0	0	0	1	11,185,600
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	4	32,940,800	0	0	0	0	4	32,940,800
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	103	1,224,814,100	0	0	0	0	103	1,224,814,100
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	325	877,464,650	0	0	0	0	325	877,464,650
3050201005	Sice	Buah	5	53,560,000	0	0	0	0	5	53,560,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	20	246,188,112	0	0	0	0	20	246,188,112
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	8,481,300	0	0	0	0	1	8,481,300
3050201013	Meja Telepon	Buah	2	16,494,800	0	0	0	0	2	16,494,800
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	26,276,100	0	0	0	0	1	26,276,100
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	6	72,842,000	0	0	0	0	6	72,842,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	1	1,221,000	0	0	0	0	1	1,221,000
3050201033	Sofa	set	12	167,173,200	0	0	0	0	12	167,173,200
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	5	20,046,600	0	0	0	0	5	20,046,600
3050204004	A.C. Split	Buah	49	420,968,556	0	0	0	0	49	420,968,556
3050204017	A.C. Cassete	Buah	3	100,000,000	0	0	0	0	3	100,000,000
3050206002	Televisi	Buah	12	456,662,150	0	0	0	0	12	456,662,150
3050206007	Loudspeaker	Buah	22	232,421,499	0	0	0	0	22	232,421,499

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 026
 UAKPB : 452533

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206008	Sound System	Buah	1	87,708,500	0	0	0	0	1	87,708,500
3050206016	Mic Conference	Buah	30	180,486,000	0	0	0	0	30	180,486,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	2	2,109,000	0	0	0	0	2	2,109,000
3050206036	Dispenser	Buah	8	33,300,000	0	0	0	0	8	33,300,000
3050206056	Karpet	Buah	1	7,590,000	0	0	0	0	1	7,590,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	1	195,942,000	0	0	0	0	1	195,942,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	10	24,732,500	0	0	0	0	10	24,732,500
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	8,935,500	0	0	0	0	1	8,935,500
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	10,545,000	0	0	0	0	1	10,545,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	6	24,697,500	0	0	0	0	6	24,697,500
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	15,984,000	0	0	0	0	4	15,984,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	13,908,000	0	0	0	0	2	13,908,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	2	19,425,000	0	0	0	0	2	19,425,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	5,439,000	0	0	0	0	1	5,439,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	3	55,154,900	0	0	0	0	3	55,154,900
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	1	28,380,000	0	0	0	0	1	28,380,000
3060102118	Head Set	Buah	4	25,263,600	0	0	0	0	4	25,263,600
3060102128	Camera Digital	Buah	8	205,781,000	0	0	0	0	8	205,781,000
3060102165	Camera Conference	Buah	4	90,585,000	0	0	0	0	4	90,585,000
3060102179	Lighting	UNIT	1	5,170,000	0	0	0	0	1	5,170,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	1	9,490,500	0	0	0	0	1	9,490,500
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	15,840,000	0	0	0	0	1	15,840,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	3	7,825,500	0	0	0	0	3	7,825,500
3060334020	Clear View Screen	Buah	7	847,000,000	0	0	0	0	7	847,000,000
3070101155	UV Sterilizer	Buah	4	23,052,480	0	0	0	0	4	23,052,480
3080302022	Linear Gate	Buah	3	611,000,000	0	0	0	0	3	611,000,000
3080602046	Air Purlier	Buah	6	44,455,500	0	0	0	0	6	44,455,500
3100102001	P.C Unit	Buah	68	1,878,638,800	0	0	0	0	68	1,878,638,800
3100102002	Lap Top	Buah	38	910,376,100	0	0	0	0	38	910,376,100
3100102003	Note Book	Buah	3	44,137,500	0	0	0	0	3	44,137,500
3100102009	Tablet PC	Buah	15	186,134,200	0	0	0	0	15	186,134,200
3100201012	Hard Disk	Buah	2	32,190,000	0	0	0	0	2	32,190,000
3100203002	Monitor	Buah	17	140,433,000	0	0	0	0	17	140,433,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	70	401,338,240	0	0	0	0	70	401,338,240
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	83,578,000	0	0	0	0	7	83,578,000
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	34,700,000	0	0	0	0	14	34,700,000
3100204002	Router	Buah	2	4,995,000	0	0	0	0	2	4,995,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
					KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204027	Rackmount	Buah	1	109,335,000	0	0	0	0	1	109,335,000
3100204037	Network Attach Storage (NAS)	unit	1	78,810,000	0	0	0	0	1	78,810,000
133111	Gedung dan Bangunan		2	36,433,334,980	0	0	0	0	2	36,433,334,980
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	36,274,252,000	0	0	0	0	1	36,274,252,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	159,082,980	0	0	0	0	1	159,082,980
134113	Jaringan		2	692,456,000	0	0	0	0	2	692,456,000
5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	2	692,456,000	0	0	0	0	2	692,456,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	11,655,000	1	109,965,000	1	109,965,000	3	11,655,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	1	109,965,000	1	109,965,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	3	11,655,000	0	0	0	0	3	11,655,000
TOTAL				56,494,010,380		109,965,000		219,930,000		56,384,045,380

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
 Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		1,005	19,356,564,400	0	0	1	109,965,000	1,004	19,246,599,400
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,877,661,500	0	0	0	0	2	1,877,661,500
3010305010	Pompa Air	Unit	1	31,635,000	0	0	0	0	1	31,635,000
3020101001	Sedan	Unit	1	270,780,000	0	0	0	0	1	270,780,000
3020101002	Jeep	Unit	8	4,455,051,300	0	0	0	0	8	4,455,051,300
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,114,336,500	0	0	1	109,965,000	4	1,004,371,500
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	39,050,000	0	0	0	0	2	39,050,000
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	2	55,944,000	0	0	0	0	2	55,944,000
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,998,000	0	0	0	0	1	1,998,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	3	118,140,000	0	0	0	0	3	118,140,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	40,800,000	0	0	0	0	6	40,800,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	24	355,416,700	0	0	0	0	24	355,416,700
3050104003	Rak Besi	Buah	1	1,887,000	0	0	0	0	1	1,887,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	4	31,666,813	0	0	0	0	4	31,666,813
3050104007	Brandkas	Buah	1	14,430,000	0	0	0	0	1	14,430,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	41,058,900	0	0	0	0	1	41,058,900
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	129,184,000	0	0	0	0	5	129,184,000
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	122,999,100	0	0	0	0	1	122,999,100
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	10	176,923,200	0	0	0	0	10	176,923,200
3050105082	Mesin Fogging	Buah	1	4,395,600	0	0	0	0	1	4,395,600
3050105095	Wastafel Portable	unit	1	11,185,600	0	0	0	0	1	11,185,600
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	4	32,940,800	0	0	0	0	4	32,940,800
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	103	1,224,814,100	0	0	0	0	103	1,224,814,100
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	325	877,464,650	0	0	0	0	325	877,464,650
3050201005	Sice	Buah	5	53,560,000	0	0	0	0	5	53,560,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	20	246,188,112	0	0	0	0	20	246,188,112
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	8,481,300	0	0	0	0	1	8,481,300
3050201013	Meja Telepon	Buah	2	16,494,800	0	0	0	0	2	16,494,800
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	26,276,100	0	0	0	0	1	26,276,100
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	6	72,842,000	0	0	0	0	6	72,842,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	1	1,221,000	0	0	0	0	1	1,221,000
3050201033	Sofa	set	12	167,173,200	0	0	0	0	12	167,173,200
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	5	20,046,600	0	0	0	0	5	20,046,600
3050204004	A.C. Split	Buah	49	420,968,556	0	0	0	0	49	420,968,556
3050204017	A.C. Cassete	Buah	3	100,000,000	0	0	0	0	3	100,000,000
3050206002	Televisi	Buah	12	456,662,150	0	0	0	0	12	456,662,150
3050206007	Loudspeaker	Buah	22	232,421,499	0	0	0	0	22	232,421,499

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206008	Sound System	Buah	1	87,708,500	0	0	0	0	1	87,708,500
3050206016	Mic Conference	Buah	30	180,486,000	0	0	0	0	30	180,486,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	2	2,109,000	0	0	0	0	2	2,109,000
3050206036	Dispenser	Buah	8	33,300,000	0	0	0	0	8	33,300,000
3050206056	Karpet	Buah	1	7,590,000	0	0	0	0	1	7,590,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	1	195,942,000	0	0	0	0	1	195,942,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	10	24,732,500	0	0	0	0	10	24,732,500
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	8,935,500	0	0	0	0	1	8,935,500
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	10,545,000	0	0	0	0	1	10,545,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	6	24,697,500	0	0	0	0	6	24,697,500
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	15,984,000	0	0	0	0	4	15,984,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	13,908,000	0	0	0	0	2	13,908,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	2	19,425,000	0	0	0	0	2	19,425,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	5,439,000	0	0	0	0	1	5,439,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	3	55,154,900	0	0	0	0	3	55,154,900
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	1	28,380,000	0	0	0	0	1	28,380,000
3060102118	Head Set	Buah	4	25,263,600	0	0	0	0	4	25,263,600
3060102128	Camera Digital	Buah	8	205,781,000	0	0	0	0	8	205,781,000
3060102165	Camera Conference	Buah	4	90,585,000	0	0	0	0	4	90,585,000
3060102179	Lighting	UNIT	1	5,170,000	0	0	0	0	1	5,170,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	1	9,490,500	0	0	0	0	1	9,490,500
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	15,840,000	0	0	0	0	1	15,840,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	3	7,825,500	0	0	0	0	3	7,825,500
3060334020	Clear View Screen	Buah	7	847,000,000	0	0	0	0	7	847,000,000
3070101155	UV Sterilizer	Buah	4	23,052,480	0	0	0	0	4	23,052,480
3080302022	Linear Gate	Buah	3	611,000,000	0	0	0	0	3	611,000,000
3080602046	Air Purlier	Buah	6	44,455,500	0	0	0	0	6	44,455,500
3100102001	P.C Unit	Buah	68	1,878,638,800	0	0	0	0	68	1,878,638,800
3100102002	Lap Top	Buah	38	910,376,100	0	0	0	0	38	910,376,100
3100102003	Note Book	Buah	3	44,137,500	0	0	0	0	3	44,137,500
3100102009	Tablet PC	Buah	15	186,134,200	0	0	0	0	15	186,134,200
3100201012	Hard Disk	Buah	2	32,190,000	0	0	0	0	2	32,190,000
3100203002	Monitor	Buah	17	140,433,000	0	0	0	0	17	140,433,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	70	401,338,240	0	0	0	0	70	401,338,240
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	83,578,000	0	0	0	0	7	83,578,000
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	34,700,000	0	0	0	0	14	34,700,000
3100204002	Router	Buah	2	4,995,000	0	0	0	0	2	4,995,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
			KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204027	Rackmount	Buah	1	109,335,000	0	0	0	0	1	109,335,000
3100204037	Network Attach Storage (NAS)	unit	1	78,810,000	0	0	0	0	1	78,810,000
133111	Gedung dan Bangunan		2	36,433,334,980	0	0	0	0	2	36,433,334,980
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	36,274,252,000	0	0	0	0	1	36,274,252,000
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	159,082,980	0	0	0	0	1	159,082,980
134113	Jaringan		2	692,456,000	0	0	0	0	2	692,456,000
5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	2	692,456,000	0	0	0	0	2	692,456,000
130112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	11,655,000	1	109,965,000	1	109,965,000	3	11,655,000
3020102003	Mini Bus (Perumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	1	109,965,000	1	109,965,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	3	11,655,000	0	0	0	0	3	11,655,000
TOTAL				56,494,010,380		109,965,000		219,930,000		56,384,045,380

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026
UAKPB : 452533

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tanggal : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software			2,865,378,000	0	0	0	0	1	2,865,378,000
8010101001	Software Komputer	dummy	1	2,865,378,000	0	0	0	0	1	2,865,378,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		0	0	0	0	0	0	0	0
8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				2,865,378,000		0		0		2,865,378,000

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026
UAKPB : 452533

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tanggal : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2026	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2026	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_p

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
301010	Peralatan dan Mesin			19,246,509,400	(14,165,114,232)	(1,138,007,198)	(15,303,121,430)	3,943,477,970
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	1,877,661,500	(1,475,305,458)	(134,118,680)	(1,609,424,138)	268,237,362
3010305010	Pompa Air	Unit	1	31,635,000	(9,038,572)	(2,259,643)	(11,298,215)	20,336,785
3020101001	Sedan	Unit	1	270,780,000	(270,780,000)	0	(270,780,000)	0
3020101002	Jeep	Unit	8	4,455,051,300	(2,963,253,755)	(281,993,379)	(3,245,247,134)	1,209,804,166
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	1,004,371,500	(983,836,499)	54,036,429	(929,800,070)	74,571,430
3020104001	Sepeda Motor	Unit	2	39,050,000	(39,050,000)	0	(39,050,000)	0
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	2	55,944,000	(19,980,000)	(3,996,000)	(23,976,000)	31,968,000
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,998,000	(1,998,000)	0	(1,998,000)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	3	118,140,000	(93,720,000)	(4,884,000)	(98,604,000)	19,536,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	6	40,800,000	(40,800,000)	0	(40,800,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	24	355,416,700	(302,925,330)	(35,541,670)	(338,467,000)	16,949,700
3050104003	Rak Besi	Buah	1	1,887,000	(943,500)	(188,700)	(1,132,200)	754,800
3050104004	Rak Kayu	Buah	4	31,666,813	(23,985,217)	(3,166,682)	(27,151,899)	4,514,914
3050104007	Brandkas	Buah	1	14,430,000	(5,772,000)	(1,443,000)	(7,215,000)	7,215,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	41,058,900	(20,529,450)	(4,105,890)	(24,635,340)	16,423,560
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	129,184,000	(129,184,000)	0	(129,184,000)	0
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	122,999,100	(61,499,550)	(12,299,910)	(73,799,460)	49,199,640
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	10	176,923,200	(175,443,200)	(740,000)	(176,183,200)	740,000
3050105082	Mesin Fogging	Buah	1	4,395,600	(3,076,920)	(439,560)	(3,516,480)	879,120
3050105095	Wastafel Portable	unit	1	11,185,600	(10,067,040)	(1,118,560)	(11,185,600)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	4	32,940,800	(29,646,720)	(3,294,080)	(32,940,800)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	103	1,224,814,100	(1,097,061,300)	(122,481,410)	(1,219,542,710)	5,271,390
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	325	877,464,650	(654,958,080)	(87,746,465)	(742,704,545)	134,760,105
3050201005	Sice	Buah	5	53,560,000	(53,560,000)	0	(53,560,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	20	246,188,112	(193,238,196)	(24,618,812)	(217,857,008)	28,331,104
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	1	8,481,300	(7,633,170)	(848,130)	(8,481,300)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	2	16,494,800	(14,845,320)	(1,649,480)	(16,494,800)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	26,276,100	(23,648,490)	(2,627,610)	(26,276,100)	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	6	72,842,000	(58,464,900)	(7,284,200)	(65,749,100)	7,092,900
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	1	1,221,000	(610,500)	(122,100)	(732,600)	488,400
3050201033	Sofa	set	12	167,173,200	(146,293,380)	(16,717,320)	(163,010,700)	4,162,500
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	5	20,046,600	(14,032,621)	(2,004,659)	(16,037,280)	4,009,320
3050204004	A C Split	Buah	49	420,968,556	(341,481,234)	(13,408,356)	(354,889,590)	66,078,966
3050204017	A C Cassete	Buah	3	100,000,000	(65,580,000)	(10,000,000)	(75,580,000)	24,420,000
3050206002	Televisi	Buah	12	456,662,150	(329,019,875)	(42,453,715)	(371,473,590)	85,188,560
3050206007	Loudspeaker	Buah	22	232,421,499	(148,226,803)	(17,213,523)	(165,440,326)	66,981,173

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_p

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050206008	Sound System	Buah	1	87,708,500	(87,708,500)	0	(87,708,500)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	30	180,486,000	(108,291,600)	(18,048,600)	(126,340,200)	54,145,800
3050206017	Unit Power Supply	Buah	2	2,109,000	(1,054,500)	(210,900)	(1,265,400)	843,600
3050206036	Dispenser	Buah	8	33,300,000	(16,650,000)	(3,330,000)	(19,980,000)	13,320,000
3050206056	Karpet	Buah	1	7,590,000	(6,831,000)	(759,000)	(7,590,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	1	195,942,000	(176,347,800)	(19,594,200)	(195,942,000)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	10	24,732,500	(15,164,300)	(2,303,250)	(17,467,550)	7,264,950
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	1	8,935,500	(4,467,750)	(893,550)	(5,361,300)	3,574,200
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	10,545,000	(6,327,000)	(1,054,500)	(7,381,500)	3,163,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	6	24,697,500	(12,348,750)	(2,469,750)	(14,818,500)	9,879,000
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	15,984,000	(7,992,000)	(1,598,400)	(9,590,400)	6,393,600
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	2	13,908,000	(9,528,000)	(1,390,800)	(10,918,800)	2,989,200
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	2	19,425,000	(10,989,000)	(1,942,500)	(12,931,500)	6,493,500
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	5,439,000	(3,263,400)	(543,900)	(3,807,300)	1,631,700
3060102061	Lensa Kamera	Buah	3	55,154,900	(33,848,450)	(4,261,290)	(38,109,740)	17,045,160
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	1	28,380,000	(28,380,000)	0	(28,380,000)	0
3060102118	Head Set	Buah	4	25,263,600	(12,631,800)	(2,526,360)	(15,158,160)	10,105,440
3060102128	Camera Digital	Buah	8	205,781,000	(141,012,500)	(12,953,700)	(153,966,200)	51,814,800
3060102165	Camera Conference	Buah	4	90,585,000	(71,852,500)	(6,608,500)	(78,461,000)	12,124,000
3060102179	Lighting	UNIT	1	5,170,000	(5,170,000)	0	(5,170,000)	0
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	1	9,490,500	(4,745,250)	(949,050)	(5,694,300)	3,796,200
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	15,840,000	(15,840,000)	0	(15,840,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	3	7,825,500	(4,695,300)	(782,550)	(5,477,850)	2,347,650
3060334020	Clear View Screen	Buah	7	847,000,000	(211,750,000)	(42,350,000)	(254,100,000)	592,900,000
3070101155	UV Sterilizer	Buah	4	23,052,480	(16,136,736)	(2,305,248)	(18,441,984)	4,610,496
3080302022	Linear Gate	Buah	3	611,000,000	(81,466,668)	(20,366,667)	(101,833,335)	509,166,665
3080602046	Air Purlier	Buah	6	44,455,500	(22,227,744)	(3,175,392)	(25,403,136)	19,052,364
3100102001	P C Unit	Buah	68	1,878,638,800	(1,437,321,925)	(128,263,375)	(1,565,585,300)	313,053,500
3100102002	Lap Top	Buah	38	910,376,100	(859,141,725)	(16,021,875)	(875,163,600)	35,212,500
3100102003	Note Book	Buah	3	44,137,500	(44,137,500)	0	(44,137,500)	0
3100102009	Tablet PC	Buah	15	186,134,200	(186,134,200)	0	(186,134,200)	0
3100201012	Hard Disk	Buah	2	32,190,000	(16,095,000)	(4,023,750)	(20,118,750)	12,071,250
3100203002	Monitor	Buah	17	140,433,000	(91,662,375)	(9,754,125)	(101,416,500)	39,016,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	70	401,338,240	(365,421,378)	(20,654,362)	(386,075,740)	15,262,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	83,578,000	(83,578,000)	0	(83,578,000)	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	14	34,700,000	(34,700,000)	0	(34,700,000)	0
3100204002	Router	Buah	2	4,995,000	(3,121,876)	(624,374)	(3,746,250)	1,248,750

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker_p

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
3100204027	Rackmount	Buah	1	109,335,000	(68,334,375)	(13,666,875)	(82,001,250)	27,333,750
3100204037	Network Attach Storage (NAS)	unit	1	78,810,000	(49,256,250)	(9,851,250)	(59,107,500)	19,702,500
133111	Gedung dan Bangunan		2	36,433,334,980	(5,700,294,358)	(487,119,006)	(6,187,413,364)	30,245,921,616
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	36,274,252,000	(5,685,976,888)	(485,528,176)	(6,171,505,064)	30,102,746,936
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	159,082,880	(14,317,470)	(1,590,830)	(15,908,300)	143,174,680
134113	Jaringan		2	692,456,000	(95,212,701)	(8,655,699)	(103,868,400)	588,587,600
5040201002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300 KVA	Unit	2	692,456,000	(95,212,701)	(8,655,699)	(103,868,400)	588,587,600
1100112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		3	11,655,000	(6,993,000)	(1,165,500)	(8,158,500)	3,496,500
3050204004	A.C. Split	Buah	3	11,655,000	(6,993,000)	(1,165,500)	(8,158,500)	3,496,500
JUMLAH			1,011	56,384,045,360	(19,967,614,291)	(1,634,947,405)	(21,602,561,694)	34,781,483,686

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPA : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl Data : 16/07/26 6:35 AM
Tanggal : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software			2,865,378,000	(2,865,378,000)	0	(2,865,378,000)	0
8010101001	Software ~~Computer~~	dummy		2,865,378,000	(2,865,378,000)	0	(2,865,378,000)	0
JUMLAH				2,865,378,000	(2,865,378,000)	0	(2,865,378,000)	0

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl.Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl.Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_1

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	194,700,231
132111	Peralatan dan Mesin	19,246,599,400
133111	Gedung dan Bangunan	36,433,334,980
134113	Jaringan	692,456,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,303,121,430)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,187,413,364)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(103,868,400)
162151	Software	2,865,378,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	11,655,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(8,158,500)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,865,378,000)
J U M L A H		34,976,183,917

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 026 KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UAKPB : 452533 SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Tgl.Data : 16/07/26 6:35 AM
Tgl.Cetak : 16/07/26 1:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	194,700,231
132111	Peralatan dan Mesin	19,246,599,400
133111	Gedung dan Bangunan	36,433,334,980
134113	Jaringan	692,456,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15,303,121,430)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6,187,413,364)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(103,868,400)
162151	Software	2,865,378,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	11,655,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(8,158,500)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,865,378,000)
J U M L A H		34,976,183,917

Jakarta, 16 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos
NIP 19750407 200112 1 001

**SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 124/07.03/2026-01**

-----Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (05-05-2026), dimulai pukul tiga belas lebih lima puluh lima menit (13:55) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----
----- Muhammad Rosyadi Akbar, Sarjana Sosial, NIP 19750407 200112 1 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KM.6/2015 tanggal 27 Mei 2015, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-806/KNL.0703/2026 tanggal 28 April 2026 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. -----
-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Moh. Amir Syarifuddin, S.T., M.M., Kepala Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 2.1/13/UM.03.03/II/2026 tanggal 27 Februari 2026, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-433/1/KNL.0703/2026 tanggal 08 April 2026 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-38/MK/KNL.0703/2026 tanggal 03 Februari 2026. -----
-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rizal Assidiq berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 2.1/9/UM.03.03/II/2026 tanggal 14 Januari 2026 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta III. -----
-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza nomor polisi B 1037 WQ dengan nomor mesin DB39396 dan nomor rangka MHFFMRGK36KO96332 -----
Nilai Limit : Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) -----
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor BNSP Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan. -----
dilelang apa adanya. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 28 April 2026. -----
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman

Lelang, dengan.../Lembar Kedua

Ttd.

Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos
NIP 19750407 200112 1 001

Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran

tertinggi secara.../Lembar Ketiga

Ttd.

Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos
NIP 19750407 200112 1 001

tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal.../Lembar Keempat

Ttd.

Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos
NIP 19750407 200112 1 001

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut,

seperti luasnya,.../Lembar Kelima

Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 124/07.03/2026-01 tanggal 5 Mei 2026
Pejabat Lelang

Ttd.

Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos
NIP 19750407 200112 1 001

seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta III. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah empat penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Avanza nomor polisi B 1037 WQ dengan nomor mesin DB39396 dan nomor rangka MHFFMRGK36KO96332 -----

Harga Lelang ----- : Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Wahadi, S.H., NIK NIK 3403041407780002, Wiraswasta, beralamat di Banjardadap RT04/RW00, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 124/07.03/2026-01 tanggal 5 Mei 2026

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) _____
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) _____
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp64.500.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) _____
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) _____
Jumlah harga barang yang ditahan: _____
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 11 (sebelas) _____
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Rizal Assidiq
NIP 199502012020121013

Muhammad Rosyadi Akbar,
S.Sos
NIP 19750407 200112 1 001

Saksi II

Saksi I

Ttd.

Ttd.

Rita Komalasari
NIP 198603202009122005

Hadiyanto
NIK 3201291701850004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya

Tanggal: 17

Kepala KPKNL Jakarta III



Rina Yulia

NIP 19700104 199603 2 001

f



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820260506263702
Tanggal Billing	06-05-2026 13:45:14
Tanggal Kedaluwarsa	13-05-2026 13:45:18
Tanggal Bayar	07-05-2026 12:30:55
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Wahadi, S.H.
Kementerian/Lembaga	026 - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
Unit Eselon I	13 - DIREKTORAT PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
Satuan Kerja	452533 - Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Total Disetor	64.500.000 (IDR)
Terbilang	<i>Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu (IDR)</i>
Status	Sudah Dibayar
NTB	303661078229
NTPN	9A5042G50C8QCO4M

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	425129-Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	64.500.000 (IDR)
Keterangan	Lelang BMN berupa satu unit kendaraan roda empat merk toyota avanza B 1037 WQ tahun 2006 pada Sekretariat BNSP, Ditjen Binalavotas, Kementrian Ketenagakerjaan dengan Kode Lot Lelang 5FIQW1



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820260507422948
Tanggal Billing	07-05-2026 12:03:23
Tanggal Kedaluwarsa	14-05-2026 12:03:23
Tanggal Bayar	07-05-2026 12:30:56
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta III
Kementerian/Lembaga	015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	537916 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA III
Total Disetor	1.290.000 (IDR)
Terbilang	<i>Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)</i>
Status	Sudah Dibayar
NTB	026998084451
NTPN	9B5417QLVBN5U474

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Nonekseksi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	1.290.000 (IDR)
Keterangan	5FIQW1 BEA LELANG 124/07.03/2026-1_05 Mei 2026_Muhammad Rosyadi Akbar, S.Sos.

UAPB : KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 UAPPB-E1 : DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
 UAPPB-W : DITJEN. PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026

TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	894,956
000009	Pensil	0
000013	Pembolong Kertas Sedang	0
000014	Spidol	0
000022	Pensil Mekanik	0
000023	Isi Pensil Mekanik	137,640
000032	Spidol Whiteboard	0
000034	Spidol Permanen Snowman Hitam	0
000042	Standard F2 Gel Pen	0
000044	Ballpoint Batik Joyko - 19	0
000046	Spidol_Whiteboard	40,700
000047	Boldliner Biru - 19	0
000048	Pulpen Boxi - 19	0
000049	Stabilo Warna - 19	0
000050	Spidol Snowman Warna - 19	0
000052	Pulpen Batik	0
000054	Ballpoint Gel K1	0
000056	Uniball Signo	0
000058	Gelpen K1 Hitam	0
000059	Gelpen K1 Biru	0
000060	Pulpen Kenko K1 Hitam	0
000061	Pen Stand Joyko	0
000062	Pen Kenko K1	0
000063	Uniball Signo Biru	0
000064	Uniball Signo Black	0
000065	Gelpen Kenko K1	0
000066	Spidol Marker Snowman	0
000067	Spidol Snowman White Board	0
000068	Pulpen Gel Kenko K1 Hitam	0
000069	Pulpen Gel Kenko K1 Biru	0
000070	Pulpen Gel Uniball Signo	0
000071	Pulpen Joyko Batik Biru	0
000072	Pulpen Joyko Batik Hitam	0
000073	Pensil Mekanik Pilot	569,800
000074	Uniball Signo Biru	0
000075	Standard Pen Boldliner Elite	0
000076	Penghapus Faber Castell	0
000077	Isi Refil Pensil Mekanik	146,816
000078	Gel Pen Joyko JK-100	0
000079	Pulpen Joyko BP-183	0
000080	Pulpen Joyko BP-179	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000081	Unibal Signo Hitam	0
000082	Uniball Signo - Biru	0
000083	Uniball Signo - Hitam	0
000084	Gelpen Kenko K1 Hitam	0
000085	Gelpen Joyko JK-100 NT Hitam	0
000086	Ballpen Joyko BP-179	0
000087	Spidol Snowman WB	0
000088	Gelpen Kenko K1 Biru	0
000089	Gelpen Uniball Signo Biru	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	288,600
000001	Tinta Pyramid Ungu	288,600
1010301003	Penjepit Kertas	344,285
000003	Binder Clips No. 105	0
000007	Binder Clips No. 260	0
000008	Paper Clips No. 3	0
000010	Stapler HD-10	0
000012	Staples HD-50 D	0
000015	Binder Clips No. 155	0
000026	Binder Clips No. 155 pcs	0
000030	Binder Klips No. 260 Kenko	0
000031	Binder Klips No. 155 Kenko	132,275
000032	Binder Clips No. 111	0
000033	Binder Klip No 105	0
000034	Binder Klip 105	49,950
000035	Trigonal Klip No. 1	0
000036	Binder Klip No. 200	0
000037	Binder Klip 111	0
000038	Binder Klip 200	122,100
000039	Binder Klip 280	39,960
1010301004	Penghapus/Korektor	0
000002	Penghapus Pensil	0
000004	Pentel Tipe Ex Pen	0
000006	Penghapus_Pensil	0
000007	Penghapus Pensil Faber-Castell	0
1010301005	Buku Tulis	399,600
000007	Buku Ekspedisi	0
000008	Buku Agenda Batik Folio - 19	0
000009	Buku Quarto obor	0
000010	Buku Expedisi	0
000011	Buku Hard Cover Folio	99,900
000012	Buku Ekspedisi	66,600
000013	Buku Agenda	233,100
1010301006	Ordner Dan Map	23,027,320
000010	Map Batik	0
000016	Ordner Bantex Merah	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000018	Map BNSP	0
000019	Ring Binder Bantex Putih 8542	0
000021	Map Plastik Kancing	0
000034	Map Biola	0
000037	Ordner Bantex	0
000040	Ordner Bantex 1312	0
000047	Bantex 8542 (40 mm)	0
000048	Map Plastik F4 Daichi	0
000049	Map Plastik A4 Daichi	0
000054	Stopmap BNSP	0
000057	Exp File Daichi CS 12 Clas Blue	0
000061	Map 5002	0
000062	Map Buffalo Diamomd - 19	0
000063	Snellhekte Buffalo Diamond - 19	0
000064	Map Plastik Daiichi A4 - 19	0
000065	Map Plastik Daiichi Folio - 19	0
000066	Ordner Bantex 1312 - 19	0
000067	Box File Bantex 4011 - 19	0
000068	Map Batik Kain - 19	0
000069	Ordner Bantex Folio Hitam -19	0
000070	Ordner Bantex Folio Warna - 19	0
000071	Map Kancing Daiichi	0
000073	Box File Jumbo Bantex	0
000075	Map Pocket	0
000076	Map Polos Putih	0
000085	Map Snelhekte BNSP	0
000086	Map Karton Putih	0
000087	Outner K	0
000088	Map 5002 Biru	0
000089	Ordner F4 Bantex Ungu	0
000090	Ordner F4 Bantex Merah	0
000091	Stopmap L A4	0
000092	Stopmap R&R 5002 - Biru	0
000093	Ordner F4 Bantex Ungu	0
000094	Kertas Map Karton	0
000095	Ordner F4 Bantex Warna Ungu	0
000096	Ordner Bantex Post Pipe 1312	0
000097	Stopmap Biru	0
000098	Stopmap Biru	0
000099	Map Sertifikat	0
000100	Map Putih BNSP	0
000101	Ordner Bantex 1312	0
000102	Map L A4	0
000103	Map L Folio	0
000104	Map Putih Packing	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000105	Map Putih BNSP	0
000106	Bantex Post Pipe 1312 Grey	0
000107	Ordner Bantex 1465 Biru	0
000108	Ordner Bantex 1465 Pistachio	0
000109	PP Pocket A4	0
000110	Ordner Bantex 1465 Ungu	0
000111	Ordner Bantex 1465 Merah	0
000112	PP Pocket A4	1,998,000
000113	PP Pocket F4	1,243,200
000114	Map Putih Packing	0
000115	Map Putih BNSP	0
000116	Map_Putih_BNSP	0
000117	Map_Putih_Packing	0
000118	Map Sertifikat Orange	0
000119	Map Packing	0
000120	Map BNSP Putih	0
000121	Map Packing BNSP	0
000122	Ordner Bantex 1465 Lilac	9,235,200
000123	Ordner Bantex 1465 Red	9,908,600
000124	Ordner Bantex A5 1452	642,320
000125	PP Pocket F4 5221	0
000126	Map_Packing	0
000127	Map Kancing	0
1010301007	Penggaris	442,627
000001	Penggaris	0
000003	Penggaris Aluminium	442,627
000004	Penggaris Butterfly 30 cm	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	664,160
000001	Gunting	0
000002	Cutter Besar	0
000004	CUTTER KK A300	0
000005	GUNTING JK 838	124,880
000006	Cutter A 300	0
000008	Gunting Joyko - 19	0
000011	Pisau Cutter A300	0
000015	Gunting Joyko Sedang	127,650
000021	Cutter L-500	228,475
000022	Isi Cutter A300	41,630
000023	Isi Cutter L-150	141,525
000024	Cutter A-300	0
1010301010	Alat Perekat	103,785
000001	Lem Prit Stick Besar	0
000005	Lakban Bening 2 Incs	0
000008	Lakban Bening 1 Inc	0
000013	Lakban Bening 2 Inc	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000015	Lakban Hitam Besar	0
000019	Lem Pronto Guest Stick 20 15 gr	0
000020	Lakban Coklat	0
000021	Lem Stick Kertas 25 M	103,785
000023	Double Tape 3M	0
000025	Double Tape Besar	0
000026	Selotip/Tape Bening 1 Inc	0
000027	Lakban Bening Daimaru 2 inc	0
000028	Lakban 1 Inch	0
000029	Lakban 2 Inch	0
000030	Lakban Bening 2 Inch	0
000031	Lakban Daimaru 2 Inch	0
000032	Double Tape Busa	0
000033	Double Tape Busa 3M	0
000034	Lakban Bening 1 Inch	0
1010301012	Staples	1,378,620
000001	Stapler HG-10 D - 19	0
000002	Staples Kenko 10-1M	1,378,620
000005	Staples HD-10	0
1010301013	Isi Staples	48,000
000001	Isi Staples No. 10 MAX - 19	0
000002	Isi Staples No. 3	48,000
000003	Isi Staples Kenko 10-1M	0
000005	Isi Staples HD-10	0
000006	Isi Stapler HD10	0
1010301014	Barang Cetakan	0
000005	Blangko Sertifikat Kompetensi (Security Printing)	0
000006	Sertifikat Kompetensi (Security Printing) 2021	0
000007	Blangko Sertifikat Kompetensi	0
000008	Blangko Sertifikat Kompetensi	0
000009	Kertas Memo	0
000010	Blangko _Sertifikat_Kompetensi	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2,703,405
000011	Post It 3M 655	0
000054	Box File Besar	0
000060	Perporator Besar	0
000062	Post It Transparant 7 warna	0
000064	Post It Mark n Note	0
000065	Post It 76 x 76	0
000066	Post It Transfaran Plastik	252,155
000091	Box Container	0
000095	Box Container Lion Star 50 MK	0
000098	Post It Tn J 44-3	0
000099	Post It 654	0
000100	Post It Pronto Mark n Note -19	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000102	Stiker Tom and Jerry 127 - 19	0
000105	Tempat Pensil Besi	0
000106	Rak File Besi Susun Tiga	0
000108	Sticker Tom Jerry	0
000109	Rak Susun Besi	0
000110	Paper Klip No. 3	0
000111	Binder Klip Warna	0
000113	Lem Stik	0
000114	Binder Klip No. 155	0
000115	Kertas Concorde	0
000116	Tape Dispenser	0
000117	Binder Clips No. 260	0
000118	Organizer Desk	0
000119	Post It 654 3M	0
000120	Stabilo	0
000121	Binder Clips No. 105	0
000122	Double Tape 2 Inc	0
000123	Gunting Joyko	0
000124	Tipe X	0
000125	Lem Kertas Stick	0
000126	Lakban Bening 1 Inc	0
000127	Klip Kertas Trigonal No. 3	0
000128	Clear Holder Pocket Bambi	0
000129	Box File Bantex	0
000130	Tas Expanding File	0
000131	Post It Notes 654	0
000132	Post It Notes 653	0
000133	Post it 6 Warna Pronto	0
000134	Post It Notes 655	0
000135	PP Pocket Folio	0
000136	PP Pocket A4	0
000137	Stabilo Boss	0
000138	Tempat Pulpen Kawat	0
000139	PP Pocket Folio	0
000140	PP Pocket A4	0
000141	Pembolong Kertas Besar	0
000142	Perforator	0
000143	Post It 654	0
000144	Post It Mark and Note Pronto	0
000145	PP Pocket A4	0
000146	PP Pocket Folio	0
000147	Post It 3M 655 Yellow	72,150
000148	Post It 653 3M Neon	0
000149	Perforator Kenko Besar	0
000150	Tape Dispenser Besar	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000151	Alat Pemotong Kertas	333,000
000152	Post it Mark n Note Pronto	1,631,700
000153	Tipe-X Pentel	414,400
000154	Double Tape 3M Busa	0
000155	Lem Stick Kenko	0
000156	Bantex 8542 07	0
000157	Binder Klip No. 280	0
000158	Bambi Divider Folio	0
000159	Bambi Divider A4	0
000160	Ordner Bantex 8563	0
000161	Post It 654 - 3M	0
000162	Stabilo	0
000163	Stabilo	0
000164	PP Pocket A4	0
000165	PP Pocket F4	0
000166	Tape Dispenser	0
000168	Tempat ATK	0
000169	Box File Folio	0
1010302001	Kertas HVS	9,490,500
000007	kertas A4	0
000008	kertas F4	0
000010	Kertas A4B	0
000011	KERTAS A4 80 GR	0
000012	KERTAS F4 80 GR	0
000014	Kertas A4 80 Gr	0
000015	Kertas F4 80 Gr	9,490,500
000016	Kerta HVS Uk. A4 80 Gr	0
000017	Kertas HVS Uk. F4 Gr - 19	0
000018	Kertas HVS Uk. A4 Gr - 19	0
000019	Kertas A4 80 Gr	0
000020	Kertas A4 80gr	0
000021	Kertas HVS A4	0
1010302002	Berbagai Kertas	0
000010	Kertas Concorde	0
000012	Kertas Foto	0
000013	Kertas Karton Putih	0
000014	Kertas Kops BNSP	0
1010302003	Kertas Cover	0
000001	Kertas Cover Art Putih	0
1010302004	Amplop	2,214,450
000001	Amplop Putih	0
000003	Amplop Map Coklat A3	854,700
000004	Amplop Coklat uk. Map - 19	0
000005	Amplop Jaya Putih	0
000006	Amplop Map Cokelat Garuda	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000007	Amplop Map Super Coklat	0
000008	Amplop Jaya - 19	0
000009	Amplop Royal	0
000010	Amplop Map Coklat	0
000011	Amplop Coklat Folio Garda	0
000012	Amplop Coklat Folio	0
000013	Amplop Putih No. 90	1,359,750
000014	Amplop Coklat A3	0
000015	Amplop Coklat Map	0
000016	Amplop Coklat F4	0
000017	Amplop Coklat Packing	0
1010302005	Kop Surat	0
000001	Kop Surat BNSP	0
000002	Kop Surat Lampiran	0
000003	Kop Surat	0
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	149,172,000
000027	Sertifikat Lisensi (Security Printing)	79,920,000
000028	Sertifikat Pelatihan (security printing)	69,252,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	0
000003	Tinta Cartridge Epson 188	0
000012	Tinta Toner Printer HP 85 A	0
000015	Tinta Epson 188 Set	0
000017	Toner HP laser jet 83 A	0
000019	TONER 85 A	0
000022	TONER 30A	0
000024	TONER 30A_new	0
000025	Toner HP 83_A	0
000029	Toner Original HP 85 A - 19	0
000030	Toner Original HP 83 A - 19	0
000033	Tinta Epson 188 Colour	0
000034	Tinta Toner Hp Laserjet 93A	0
000036	Tinta Toner HP Laserjet 85A	0
000037	Toner HP Laserjet 30A	0
000038	Toner HP LJ 85A	0
000039	Toner HP LJ 93 A	0
000041	Toner HPLJ 107A	0
000042	Toner Hp Laser Jet 107 A	0
000043	HP Laserjet 107A	0
000044	Hp Laserjet 107 A	0
000045	Toner HP Laserjet 85 A	0
000046	Toner HP Laserjet 30 A	0
000047	Toner HP Laserjet 107 A	0
000048	Toner HP Laserjet 83 A	0
000049	HP LJ 107A	0
000050	HP LJ 30A	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000051	Tinta Epson 188 Set	0
000052	Toner HP 107A	0
000053	Toner HP 30A	0
000054	Tinta Epson 188	0
000055	Tinta Printer Epson 188 Cyan	0
000056	Tinta Printer Epson 188 Magenta	0
000057	Tinta Printer Epson 188 Black	0
000058	Tinta Printer Epson 188 Yellow	0
000059	Tinta Printer Canon 054 Black	0
000060	Canon NPG 51 Fotocopy	0
000061	Toner Canon 054 CYAN	0
000062	Toner Canon 054 BLACK	0
000063	Toner Canon 054 MAGENTA	0
000064	Toner Canon 054 YELLOW	0
000065	Toner HP Laserjet 85A	0
000066	Toner Canon 054 - Cyan	0
000067	Toner Canon 054 - Black	0
000068	Toner Canon 054 - Magenta	0
000069	Toner Canon 054 - Yellow	0
000070	Toner HP LJ 30A	0
000071	Toner HP LJ 85A	0
000072	Toner HP LJ 83A	0
000073	Toner Canon 054 - Cyan	0
000074	Toner Canon 054 - Black	0
000075	Toner Canon 054 - Magenta	0
000076	Toner Canon 054 - Yellow	0
000077	Toner HP 30A DataPrint	0
000078	Toner HP 85A DataPrint	0
000079	Toner HP 107A DataPrint	0
000080	Toner HP 83A DataPrint	0
000081	Tinta Printer Epson 188 Black	0
000082	Toner HP 32A	0
000083	Toner HP107A Data Print	0
000084	Toner HP 85A Data Print	0
000085	Toner HP 83A Data Print	0
000086	Toner HP 76A	0
000087	Tinta Epson 188 - Black	0
000088	Toner Canon 054 Biru DP	0
000089	Toner Canon 054 Merah DP	0
000090	Toner Canon 054 Hitam DP	0
000091	Toner Canon 054 Kuning DP	0
000092	Toner 85 A DataPrint	0
000093	Toner 30 A DataPrint	0
000094	Toner 83 A DataPrint	0
000095	Toner Fotocopy NPG-87	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000096	Tinta Toner Canon 054 Yellow	0
000097	Tinta Toner Canon 054 Black	0
000098	Tinta Toner Canon 054 Cyan	0
000099	Tinta Toner Canon 054 Magenta	0
000100	Toner HP 107 A	0
000101	Tinta/Toner 054 Black	0
000102	Tinta/Toner 054 Yellow	0
000103	Tinta/Toner 054 Cyan	0
000104	Tinta/Toner 054 Magenta	0
000105	Tinta 188 Cyan	0
000106	Tinta 188 Yellow	0
000107	Toner NPG-87	0
1010304006	USB/Flash Disk	0
000002	USB Flash Disk 16 Gb	0
000003	USB / Flash Disk	0
000006	USB Flash Disk 32 gB	0
000009	USB 3.0 Hub	0
000010	Flashdisk 16 Gb - 19	0
000011	Multiport USB	0
000013	USB 32 Gb	0
000014	Flashdisk	0
1010304009	Harddisk Internal	0
000001	Harddisk	0
000002	Sandisk 1 TB	0
1010304010	Mouse	0
000004	Mouse Wireless Logitech	0
000006	Mouse	0
000007	Mouse Wireless Logitech - 19	0
000009	Mouse Wireless Logitech	0
000011	Mouse Wifi Merah	0
000012	Mouse Wifi Biru	0
000013	Mouse Logitech Hitam	0
000014	Mouse Logitech Merah	0
000015	Mouse Logitech Biru	0
000016	Mouse Logitech Hitam	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	0
000019	T.P Link USB -19	0
000023	Keyboard Logitech	0
000030	Keyboard Logitect Ori	0
000042	Kabel HDMI 3 meter	0
1010306001	Kabel Listrik	0
000001	Kabel Roi	0
1010306002	Lampu Listrik	0
000001	Bola Lampu TL LED	0
000003	Lampu Bohlam	0

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2026
TAHUN ANGGARAN : 2026

NAMA UAKPB : Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

KODE UAKPB : 026.13.0199.452533

KODE	U R A I A N	NILAI PER 30-06-2026
000004	Lampu LED	0
000005	Lampu Bohlam Philips	0
000006	Lampu Downlight	0
000007	Lampu Sorot	0
1010306010	Batu Baterai	3,527,923
000001	Baterai AA Alkaline	0
000002	Baterai AAA Alkaline	0
000003	Baterai ABC Alkaline AA	0
000004	Baterai ABC Alkaline AAA	0
000005	Baterai Alkaline AA	0
000006	Baterai Alkaline AAA	0
000007	Baterai ABC Alkaline AAA	0
000008	Baterai ABC Alkaline AA	0
000009	Baterai Alkaline AA	0
000010	Baterai ABC - AA	1,190,448
000011	Baterai ABC AAA	2,337,475
Jumlah per Akun		194,700,231
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	0
000004	Philips Air Purifier	0
000005	Krisbow 3 in1 Hand Vacuum	0
000006	Cold Fogging Machine	0
000007	Fogging Liquid Bl.	0
000008	UV Sterilizer	0
000009	Krisbow 3 in 1 Vacuum	0
Jumlah per Akun		0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai	0
Jumlah per Akun		0
Total Jumlah		194,700,231

Keterangan

- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi rusak
- Persediaan senilai 0,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 30-06-2026

Kuasa Pengguna Barang

Kepala Sekretariat



MOH AMIR SYARIFUDDIN, S.T., M.M.
19690725 199703 1 001

Jakarta, 30-06-2026

Petugas Pengelola Persediaan

Rita Komalasari
19860320 200912 2 005